



**Mahkamah Agung
Republik Indonesia**

**Ringkasan Eksekutif
Laporan Tahunan 2018**

Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi





Laporan Tahunan 2018

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi



Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia



Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial



Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial



Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI



Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M
Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI



Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.
Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI



Dr. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.
Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI



Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.
Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI



Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.
Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI

Daftar Isi

01 Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi

02 Manajemen Perkara

- 02 Pembaruan Fungsi Teknis dan Manajemen Perkara
- 05 Keadaan Perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

17 Reformasi Birokrasi dan Akses Terhadap Keadilan

- 17 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- 21 Akses Terhadap Keadilan dan Peningkatan Pelayanan Publik

26 Manajemen Sumber Daya Manusia

- 26 Program Pembaruan
- 28 Pengadaan SDM
- 31 Pengembangan SDM
- 37 Promosi dan Mutasi
- 42 Pelaksanaan Kebijakan Nasional

44 Manajemen Keuangan, Aset dan Teknologi Informasi

- 44 Program Pembaruan
- 46 Manajemen Keuangan
- 50 Manajemen Aset
- 55 Penerapan Manajemen Teknologi Informasi

57 Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan

- 57 Program Pembaruan
- 58 Penelitian dan Pengkajian
- 61 Jurnal Hukum dan Peradilan

62 Pengawasan

- 62 Program Pembaruan
- 63 Kegiatan Badan Pengawasan
- 70 Sistem Pengendalian Internal
- 71 Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung (SIWAS)
- 71 Internal Audit Capability Model (IACM)
- 72 Capaian Kinerja Badan Pengawasan

73 Peran Serta Mahkamah Agung

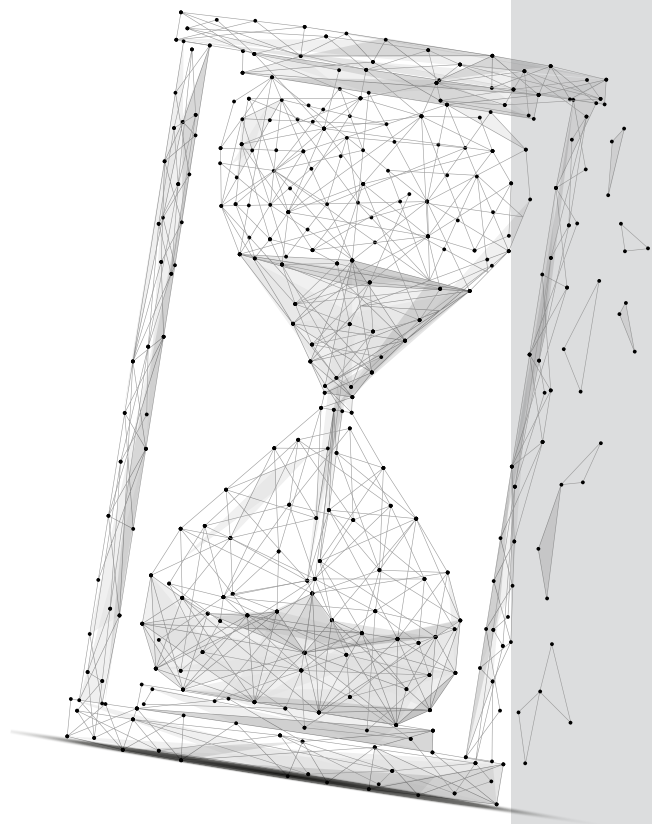
- 73 Forum Nasional
- 74 Forum Internasional

Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi

Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi merupakan momentum penting dalam peradilan Indonesia yaitu beralihnya sistem administrasi peradilan manual ke sistem administrasi peradilan elektronik. Terbitnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik yang diikuti dengan peluncuran aplikasi *e-Court* telah membuka ruang bagi proses pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filing*) pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik (*e-payment*), pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak secara elektronik (*e-summons*). Ketiga fitur dalam aplikasi *e-Court* tersebut terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Sistem Informasi Perkara (SIAP) Mahkamah Agung dan Direktori Putusan.

Semangat modernisasi pada Mahkamah Agung didorong oleh visi untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung melalui penyelenggaraan peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan. Selain modernisasi pada fungsi utama penyelesaian perkara, upaya modernisasi juga telah dilakukan pada fungsi penunjang peradilan antara lain dengan membangun Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIMARI) yang meliputi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), dan Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS MA RI).

Manajemen Perkara



PEMBARUAN FUNGSI TEKNIS DAN MANAJEMEN PERKARA

Kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya berdasarkan laporan tahunan dari waktu ke waktu cenderung terus meningkat. Beberapa indikator yang menunjukkan meningkatnya kinerja lembaga peradilan tersebut adalah jumlah produktivitas memutus perkara terus meningkat, rerata waktu memutus perkara semakin cepat, dan jumlah sisa perkara yang terus berkurang.

Kecenderungan meningkatnya kinerja penanganan perkara ini berkaitan erat dengan program pembaruan peradilan, khususnya pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara, sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Keadaan ini mengindikasikan bahwa program pembaruan peradilan berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja penanganan perkara.

Pembaruan fungsi teknis pada tahun 2018 berorientasi pada penguatan sistem kamar dan penyederhanaan proses berperkara, sedangkan pembaruan manajemen perkara diarahkan pada pembenahan manajemen peradilan yang berorientasi pada pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi. Hasil akhir yang diharapkan dari program modernisasi manajemen perkara adalah efisiensi proses penanganan perkara.

Pembaruan Bidang Teknis

Implementasi pembaruan di bidang teknis oleh Mahkamah Agung merujuk pada kewenangan yang diberikan oleh Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yakni dalam rangka membuat peraturan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum sehingga penyelenggaraan fungsi peradilan berjalan secara efektif.

Pembaruan bidang teknis yang dilakukan Mahkamah Agung sepanjang tahun 2018 adalah melalui penerbitan berbagai kebijakan sebagai berikut:

1. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum.
2. PERMA Nomor 2 Tahun 2018 tentang Hakim Khusus untuk Mengadili Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum.
3. PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
4. PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.
5. PERMA Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO).
7. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 189/KMA/SK/IX/2018 Tanggal 27 September 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Pemidanaan pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, untuk penguatan sistem kamar dilakukan melalui kegiatan:

1. Penyederhanaan format putusan Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (*Template*) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung.
2. Penyusunan yurisprudensi Mahkamah Agung dan rumusan kaidah hukum dalam putusan-putusan penting.
3. Penyusunan tata tertib dan mekanisme pleno kamar.
4. Penyusunan rencana kerja advokasi pengurangan arus perkara ke Mahkamah Agung dan pembentukan tim seleksi perkara.

Pembaruan Bidang Manajemen Perkara

Pembaruan bidang manajemen perkara merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa badan peradilan wajib membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pembaruan yang dilakukan bidang manajemen perkara sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Standardisasi penerbitan keterangan pengadilan untuk syarat administratif menduduki semua jabatan publik tanpa dikenakan biaya dengan menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 terhadap Semua Jenis Surat Keterangan.
2. Prosedur penyampaian *relaas* panggilan/pemberitahuan pihak berperkara yang berada di luar negeri.
3. Perluasan implementasi penyetoran biaya perkara secara elektronik (*e-payment*) untuk beberapa jenis layanan pengadilan, yaitu: pembayaran biaya perkara permohonan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak, pembayaran biaya permohonan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang Terhadap Undang-Undang (Hak Uji Materiil) dan pembayaran biaya penyampaian *relaas* panggilan/pemberitahuan bagi pihak berperkara yang berada di luar negeri.
4. Penyempurnaan konten informasi pada Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan menambahkan rumusan hasil pleno kamar, *restatement*, kaidah hukum dan yurisprudensi tetap.
5. Penyusunan Buku Pedoman Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang (PKPU)
6. Pengaturan kembali prosedur pelaporan penerimaan dan penggunaan biaya perkara pada pengadilan dengan menerbitkan SEMA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan.

KEADAAN PERKARA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

Keadaan perkara pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya berdasarkan tingkatan peradilan dan lingkungan peradilan adalah sebagai berikut:

Tabel Keadaan Perkara MA, Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Pajak Tahun 2018

Tingkat Peradilan	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Cabut	Sisa
Mahkamah Agung	1.388	17.156	18.544	17.638	0	906
Pengadilan Tk Banding	2.527	19.066	21.593	18.757	59	2.777
Pengadilan Tk Pertama	116.351	6.075.539	6.191.890	6.062.173	12.914	116.803
Pengadilan Pajak	11.804	11.436	23.240	9.913	0	13.327
Jumlah	132.070	6.123.197	6.255.267	6.108.481	12.973	133.813

Tabel Keadaan Perkara MA dan Badan Peradilan di Bawahnya

Lingkungan Peradilan	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Cabut	Sisa 2018
Mahkamah Agung	1.388	17.156	18.544	17.638	0	906
Peradilan Umum	42.894	5.530.220	5.573.114	5.522.858	4.421	45.835
Peradilan Agama	74.839	558.037	632.876	551.956	8.233	72.687
Peradilan Militer	374	3.140	3.514	3.247	26	241
Peradilan TUN	771	3.208	3.979	2.869	293	817
Pengadilan Pajak	11.804	11.436	23.240	9.913	0	13.327
Jumlah	132.070	6.123.197	6.255.267	6.108.481	12.973	133.813

Perkara yang diterima 4 (empat) lingkungan peradilan di Indonesia tahun 2018 meningkat 13,27% dibandingkan tahun 2017 yang menerima sebanyak 5.405.939 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 14,21% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 5.348.649 perkara. Jumlah sisa perkara berkurang 13,94% dari tahun 2017 yang berjumlah 155.624 perkara. Rasio produktivitas penyelesaian perkara Badan Peradilan Indonesia sebesar 97,65%.

Kinerja Penanganan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2018

Keadaan perkara Mahkamah Agung tahun 2018 yang menunjukkan kinerja penanganan perkara secara umum adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2018 berdasarkan Jenis Perkara

Jenis perkara	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah beban	Putus 2018	Sisa 2018	Rasio Produktivitas
Perdata	525	4.604	5.129	5.075	54	98,95%
Perdata Khusus	101	1.435	1.536	1.504	32	97,92%
Pidana	208	1.314	1.522	1.487	35	97,70%
Pidana Khusus	541	4.056	4.597	3.813	784	82,95%
Perdata Agama	0	919	919	919	0	100,00%
Pidana Militer	10	362	372	372	0	100,00%
Tata Usaha Negara	3	4.466	4.469	4.468	1	99,98%
Jumlah	1.388	17.156	18.544	17.638	906	95,11%

Jumlah perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2018 meningkat 10,65% dibandingkan tahun 2017 yang menerima 15.505 perkara. Beban penanganan perkara meningkat 3,82% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 17.862 perkara. Perkara yang diputus meningkat 7,07% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 16.474 perkara. Sisa perkara berkurang 34,73% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 1.388 perkara.

Keadaan perkara pada Mahkamah Agung tahun 2018 berdasarkan jenis kewenangan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung tahun 2018 Berdasarkan Jenis Kewenangan

No.	Jenis Kewenangan	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Sisa 2018
A	Perkara					
1	Kasasi	1.207	11.476	12.683	11.924	759
2	Peninjauan Kembali	168	2.035	2.203	2.067	136
4	Kasasi Untuk Kepentingan Umum	0	0	0	0	0
5	Peninjauan Kembali Perkara Pajak	0	3.491	3.491	3.491	0
5	Grasi	12	66	78	68	10
6	Hak Uji Materil (PPU)	1	77	78	77	1
7	Sengketa Kewenangan Mengadili	0	0	0	0	0
8	Permohonan Uji Pendapat	0	2	2	2	0
9	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	0	9	9	9	0
	Jumlah	1.388	17.156	18.544	17.638	906
B.	Non Perkara					
	Permohonan Fatwa	0	26	26	26	0

Jumlah perkara kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2018 meningkat 0,70% dibandingkan tahun 2017 yang menerima 11.396 perkara. Jumlah perkara peninjauan kembali yang diterima meningkat 13,75% dibandingkan tahun 2017 yang menerima 1789 perkara. Jumlah perkara peninjauan kembali perkara pajak meningkat 59,63% dibandingkan tahun 2017 yang menerima 2.187 perkara. Jumlah permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (hak uji materiil) meningkat 14,93% dibandingkan tahun 2017 yang menerima 67 perkara. Jumlah permohonan grasi meningkat 11,86 % dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 59 perkara.

Jumlah perkara yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju pada tahun 2018 sebanyak 18.881 perkara. Jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima sebanyak 17.156 perkara, maka rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) mencapai 110,05%. Jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju meningkat 14,90% dibandingkan dengan tahun 2017 yang telah mengirim sebanyak 16.433 perkara. Rasio penyelesaian perkara untuk setiap jenis perkara sebagaimana tabel berikut:

Tabel Rasio Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Tahun 2018

No	Jenis Perkara	Jumlah Masuk	Jumlah Kirim	%
1	Perdata	4.604	6.014	130,63%
2	Perdata Khusus	1.435	1.909	133,03%
3	Pidana	1.314	1.659	126,26%
4	Pidana Khusus	4.056	3.273	80,70%
5	Perdata Agama	919	1.104	120,13%
6	Pidana Militer	362	545	150,55%
7	Tata Usaha Negara	4.466	4.377	98,01%
	Jumlah	17.156	18.881	110,05%

Mahkamah Agung berhasil memutus 96,33% perkara dengan tenggang waktu di bawah 3 bulan. Percepatan waktu memutus tahun 2018 meningkat 4,31% dibandingkan tahun 2017 dimana jumlah perkara putus dibawah 3 bulan berjumlah 92,02%. Rerata waktu memutus perkara tahun 2018 pada setiap jenis perkara adalah sebagaimana tabel di bawah. Perhitungan rerata waktu memutus adalah selisih antara tanggal berkas perkara diterima oleh ketua majelis dengan tanggal perkara diputus.

Tabel Rerata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan Mahkamah Agung Tahun 2018

No.	Jenis Perkara	Lamanya Proses Pemeriksaan (dalam Bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 s.d 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
1	Perdata	4.777	279	18	0	1	5.075
2	Perdata Khusus	1.483	21	0	0	0	1.504
3	Pidana	1.452	34	1	0	0	1.487
4	Pidana Khusus	3.547	178	66	22	0	3.813
5	Perdata Agama	918	1	0	0	0	919
6	Pidana Militer	372	0	0	0	0	372
7	Tata Usaha Negara	4.442	24	2	0	0	4.468
Jumlah		16.991	537	87	22	1	17.638
%		96,33%	3,04%	0,49%	0,12%	0,01%	

Rerata waktu minutasasi perkara Mahkamah Agung tahun 2018 adalah sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel Rerata Waktu Minutasasi Perkara Mahkamah Agung Tahun 2018

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Minutasasi (dalam bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 s.d 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
1	Perdata	654	2.224	2.562	562	12	6.014
2	Perdata Khusus	549	762	529	66	3	1.909
3	Pidana	115	327	585	527	105	1.659
4	Pidana Khusus	121	442	1.276	1.252	182	3.273
5	Perdata Agama	159	555	390	0	0	1.104
6	Pidana Militer	1	25	424	94	1	545
7	Tata Usaha Negara	3.860	456	60	1	0	4.377
Jumlah		5.459	4.791	5.825	2.503	303	18.881
%		28,91%	25,38%	30,85%	13,26%	1,61%	

Amar putusan Mahkamah Agung terhadap perkara yang diajukan upaya hukum kasasi tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2018

No.	Jenis Perkara	Amar Putusan					Jumlah
		Kabul	Tolak	Tolak Perbaikan	NO	Pencabutan	
1	Perdata	504	3.311	184	14	9	4.022
2	Perdata Khusus	240	760	226	21	1	1.248
3	Pidana	189	952	227	16	1	1.385
4	Pidana Khusus	607	1.760	1.041	39	5	3.452
5	Perdata Agama	117	472	150	49	8	796
6	Jinayat (Agama)	2	8	0	0	1	11
7	Pidana Militer	25	243	44	26	0	338
8	Tata Usaha Negara	102	494	17	58	1	672
Jumlah		1.786	8.000	1.889	223	26	11.924
%		14,98%	67,09%	15,84%	1,87%	0,22%	

Amar putusan Mahkamah Agung terhadap perkara yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Tahun 2018

No.	Jenis Perkara	Ama Putusan				Jumlah
		Kabul	Tolak	NO	Pencabutan	
1	Perdata	159	848	40	6	1.053
2	Perdata Khusus	49	172	34	1	256
3	Pidana	8	69	4	0	81
4	Pidana Khusus	53	245	17	0	315
5	Perdata Agama	5	85	21	1	112
6	Pidana Militer	3	31	0	0	34
7	Tata Usaha Negara	40	164	10	2	216
8	Pajak	619	2.783	85	4	3.491
Jumlah		936	4.397	211	14	5.558
%		16,84%	79,14%	3,80%	0,25%	

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Penanganan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2018

Pencapaian kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung tahun 2018 dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

- 1) Rasio jumlah perkara yang telah diputus dengan jumlah beban perkara (rasio produktivitas memutus perkara) tahun 2018 sebesar 95,11%. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan (70%) sebesar 25,11%. Rasio produktivitas memutus perkara tahun 2018 meningkat 2,89% dari tahun 2017 yang memiliki rasio produktivitas sebesar 92,23%. dan menjadi capaian tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung.
- 2) Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) sebesar 110,05%. Capaian ini berada 10,05% di atas target IKU.
- 3) Jumlah perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung sesuai jangka waktu penanganan perkara (*on time case processing*) sebanyak 16.991 perkara atau 96,33%. Jumlah ini meningkat 4,31% dibandingkan dengan tahun 2017 yang capaiannya sebesar 92,02%. Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara sebanyak 5.459 perkara (28,91%). Jumlah ini meningkat 5,16% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 5.191. Dari sisi rasio dengan keseluruhan perkara yang diminutasi tahun 2018, berkurang 2,36% dibandingkan tahun 2017 yang capaiannya sebesar 31,27%.
- 4) Jumlah tunggakan perkara berkurang 34,73% dari keseluruhan perkara aktif dibandingkan dengan tahun 2017. Jumlah sisa perkara tahun 2018, merupakan sisa terkecil dalam sejarah Mahkamah Agung.

Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding

Kinerja penanganan perkara pada pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan dan pengadilan pajak adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2018

Lingkungan Peradilan	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Cabut	Sisa 2018
Peradilan Umum	2.286	15.224	17.510	14.905	49	2.556
Peradilan Agama	85	2.416	2.501	2.424	1	76
Peradilan Militer	2	378	380	365	5	10
Peradilan TUN	154	1.048	1.202	1.063	4	135
Pengadilan Pajak	11.804	11.436	23.240	9.913	0	13.327
Jumlah	14.331	30.502	44.833	28.670	59	16.104

Jumlah perkara yang diterima tahun 2018 meningkat 10,84% dibandingkan tahun 2017 yang menerima sebanyak 27.519 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 0,38% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 28.778 perkara. Jumlah sisa perkara meningkat 7,28% dari tahun 2017 yang berjumlah 15.011 perkara. Persentase sisa perkara dibandingkan jumlah beban penanganan perkara sebesar 36,20%. Keadaan ini menunjukkan tingkat produktivitas penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding (termasuk pengadilan pajak) sebesar 63,95%. Rasio produktivitas memutus pengadilan tingkat banding di luar pengadilan pajak sebesar 86,87%. Rasio ini meningkat 2,31% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 84,56%.

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama

Kinerja penanganan perkara pada pengadilan tingkat pertama dari empat lingkungan peradilan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dari Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2018

Lingkungan Peradilan	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Cabut	Sisa 2018
Peradilan Umum	40.608	5.514.996	5.555.604	5.507.953	4.372	43.279
Peradilan Agama	74.754	555.621	630.375	549.532	8.232	72.611
Peradilan Militer	372	2.762	3.134	2.882	21	231
Peradilan TUN	617	2.160	2.777	1.806	289	682
Jumlah	116.351	6.075.539	6.191.890	6.062.173	12.914	116.803

Jumlah perkara yang diterima tahun 2018 meningkat 13,29 % dibandingkan tahun 2017 yang menerima sebanyak 5.362.915 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 14,31% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 5.303.397 perkara. Jumlah sisa perkara berkurang 13,88% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 135.622 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara pada pengadilan tingkat pertama sebesar 97,91%.

Jumlah putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan upaya hukum banding sebanyak 19.066 perkara dan yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 233 perkara.

Akseptabilitas Putusan Pengadilan

Akseptabilitas putusan pengadilan adalah penerimaan pihak berperkara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap kasus hukum atau sengketa yang dihadapinya. Akseptabilitas ditunjukkan dengan tidak dilakukannya upaya hukum terhadap putusan tersebut.

Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Tingkat akseptabilitas putusan pengadilan tingkat pertama diketahui dengan membandingkan jumlah perkara yang diputus pada pengadilan tingkat pertama yang berdasarkan hukum acara dapat diajukan banding dengan jumlah upaya hukum yang diterima oleh pengadilan tingkat banding, sebagaimana tabel berikut:

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2018

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Peradilan umum		Agama	Militer	TUN	Jumlah
	Perdata	Pidana				
Jumlah Perkara Putus Pengadilan Tk Pertama	29.998	150.065	453.019	2.377	1.806	184.246
Jumlah Perkara Masuk Pengadilan Tk. Banding	6758	8466	2416	378	1001	16596
Rasio Upaya Hukum Banding	22,53%	5,64%	0,53%	15,90%	55,43%	9,01%
Tingkat Akseptabilitas	77,47%	94,36%	99,47%	84,10%	44,57%	90,99%

Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding

Tingkat akseptabilitas putusan pengadilan tingkat banding diketahui dengan membandingkan jumlah perkara yang diputus pada pengadilan tingkat banding dengan jumlah upaya hukum kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung, sebagaimana tabel berikut.

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Umum		Agama	Militer	TUN	Jumlah
	Perdata	Pidana				
Jumlah Perkara Diputus Pengadilan Tk Banding	6.665	8.240	2.424	365	1.063	18.757
Jumlah Permohonan Kasasi	4.784	4.885	807	328	672	11.476
Rasio Upaya Hukum Kasasi	71,78%	59,28%	33,29%	89,86%	63,22%	61,18%
Tingkat Akseptabilitas Putusan Banding	28,22%	40,72%	66,71%	10,14%	36,78%	38,82%

Akseptabilitas Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Tingkat akseptabilitas putusan kasasi diketahui dengan membandingkan jumlah perkara kasasi yang diputus dengan jumlah upaya hukum peninjauan kembali atas putusan kasasi yang diajukan peninjauan kembali sebagaimana tabel berikut:

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2018

Keadaan Perkara	Umum		Agama	Militer	TUN	Jumlah
	Perdata	Pidana				
Jumlah Perkara Diputus dalam Tk Kasasi	5.270	4.837	807	338	672	11924
Jumlah Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi	1.084	280	75	30	160	1.629
Rasio Upaya Peninjauan Kembali	20,57%	5,79%	9,29%	8,88%	23,81%	13,66%
Tingkat Akseptabilitas Putusan Kasasi	79,43%	94,21%	90,71%	91,12%	76,19%	86,34%

Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi dan Diversi Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi

Penyelesaian perkara perdata pada pengadilan negeri dan pengadilan agama melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Data Penyelesaian Perkara melalui Mediasi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tahun 2018

No	Pengadilan	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi		
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan
1	Pengadilan Negeri	18.339	1.048	16.593	698
2	Pengadilan Agama	68.475	4.258	50.728	13.489
	Jumlah	86.814	5.306	67.321	14.187

Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi

Penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi sebagaimana tabel berikut:

Tabel Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi

Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Status Keberhasilan		
		Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
6018	596	273	223	100

Rasio Beban dan Kinerja Penanganan Perkara Rasio Beban Penanganan Perkara dengan Jumlah Hakim

Rasio beban penanganan perkara adalah perbandingan jumlah perkara yang ditangani badan peradilan dengan jumlah hakim pada lembaga tersebut. Untuk mendapatkan rata-rata beban penanganan perkara per hakim, hasil perbandingan tersebut dikali tiga. Hal ini karena pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis yang terdiri atas tiga orang hakim. Rasio beban penanganan perkara per hakim pada masing-masing lingkungan peradilan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2018

No	Rasio Beban Kerja	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Pengadilan Pajak	Jumlah
1	Jumlah Perkara Tk Pertama	5.555.604	626.951	3.134	2.777		6.188.466
	Jumlah Hakim	2.983	2.809	108	298		6.198
	Rasio Hakim dengan Jumlah Perkara	1: 1.862	1: 223	1: 29	1: 9		1: 998
	Rata-Rata Beban @ Hakim	5.587	670	87	28		2.995
2	Jumlah Perkara Tk Banding	17.510	2.419	380	1.195	23.240	44.744
	Jumlah Hakim	733	380	27	44	63	1.247
	Rasio Hakim dengan Jumlah Perkara	1: 24	1: 6	1: 14	1: 27	1: 369	1: 36
	Rata-Rata Beban @ Hakim	72	19	42	81	1.107	108

Catatan :

- Rata-rata beban per hakim adalah jumlah rasio perkara bagi setiap hakim dikalikan 3 (tiga), oleh karena persidangan dilakukan dengan majelis, maka setiap perkara didistribusikan kepada 3 orang hakim.
- Jumlah perkara pada pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum termasuk perkara pelanggaran lalu lintas (pidana cepat) sebanyak 5.232.939 perkara. Jumlah perkara diluar pelanggaran lalu lintas sebanyak 322.655 perkara. Dengan jumlah ini, rasio hakim dengan jumlah perkara adalah 1:108, sedangkan rata-rata beban per hakim sebanyak 324.

Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung tahun 2018

Jumlah	Perdata	Pidana	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumah Perkara	6.665	6.119	919	372	4.469	18544
Jumlah Hakim Agung	16	15	7	3	7	48
Rasio Hakim Agung dengan Perkara	1: 417	1: 408	1: 131	1: 124	1: 638	: 386
Rerata Beban Kerja@hakim	1.250	1.224	394	372	1.915	1.159

Rasio Kinerja Penanganan Perkara dengan Jumlah Hakim

Rasio kinerja penanganan perkara adalah perbandingan jumlah perkara yang diputus badan peradilan dengan jumlah hakim. Untuk mendapatkan rata-rata kinerja penanganan perkara per hakim, hasil perbandingan tersebut dikali tiga. Hal ini karena pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis yang terdiri atas tiga orang hakim. Rasio kinerja penanganan perkara per hakim pada masing-masing lingkungan peradilan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding tahun 2018

No	Produktifitas	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Pengadilan Pajak	Jumlah
1	Perkara Putus Pengadilan Tk Pertama	5.507.953	549.532	2.882	1.806		6.062.173
	Hakim	2983	2809	108	298		6198
	Rasio	1846	196	27	6		978
	Rata-Rata Produktifitas @ Hakim	5539	587	80	18		2934
2	Perkara Putus Pengadilan Tk Banding	14905	2424	365	1063	9913	28670
	Hakim	733	380	27	44	63	1247
	Rasio	20	6	14	24	157	23
	Rata-Rata Produktifitas @ Hakim	61	19	41	72	472	69

Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Tahun 2018

Jumlah	Perdata	Pidana	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah Perkara Putus	6.579	5.300	919	372	4.468	17.638
Jumlah Hakim Agung	16	15	7	3	7	48
Rasio Hakim Agung dengan Perkara	411	353	131	124	638	367
Rerata Kinerja masing-masing Hakim Agung	1.234	1.060	394	372	1.915	1.102

Kontribusi Keuangan Perkara Terhadap Keuangan Negara

Kontribusi dari PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak dari layanan penanganan perkara pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, adalah sebagaimana tabel berikut:

No.	Akun		Realisasi
1	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	315.715.001
2	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	880.565.000
3	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	19.888.589.400
4	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	19.226.285.652
Jumlah			40.311.155.053

Kontribusi dari Uang Denda dan Uang Pengganti yang Berasal dari Perkara Pidana

Mahkamah Agung

No	Jenis	Jumlah
1	Uang denda dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, kekhutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dll	2.611.063.875.911
2	Uang pengganti dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, lingkungan hidup, dll	606.554.418.659
Jumlah		3.217.618.294.570

Peradilan Umum

No	Jenis	Jumlah (Rp)
1	Uang denda dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, kekhutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, perkara lalu lintas dll	20.101.589.119.400
2	Uang pengganti dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, lingkungan hidup, dll	16.364.236.747.365
Jumlah		36.465.825.866.765

Peradilan Militer

No	Klasifikasi	Jumlah Perkara	Jumlah Denda/Uang Pengganti
1	Kejahatan	2741	76.084.200.426
2	Pelanggaran	505	93.420.000
Jumlah		3246	76.177.620.426

Pengelolaan Keuangan Perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Biaya Proses Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung

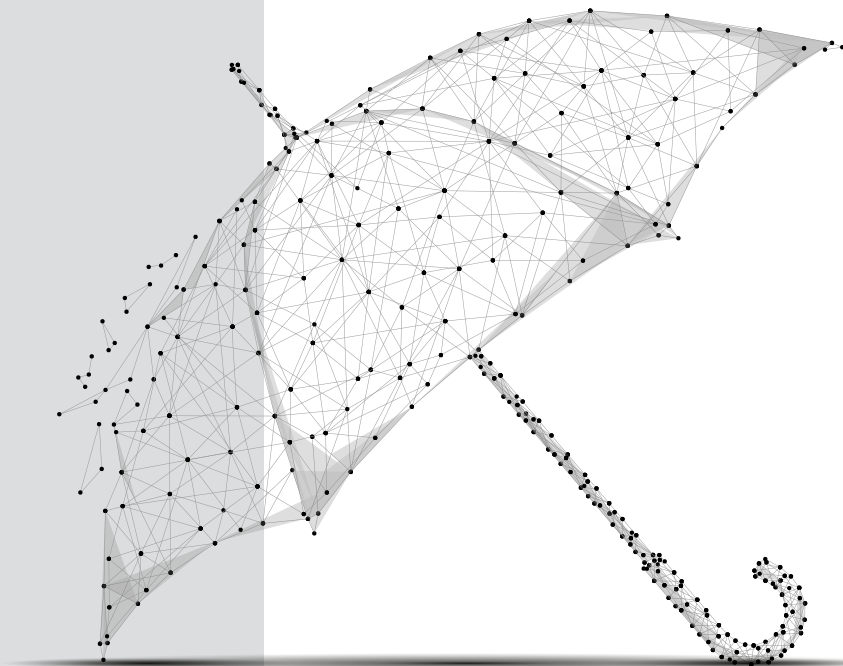
No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	Saldo Awal Tahun 2018	37.532.200.943	
2	Penerimaan Tahun 2018	21.283.405.673	
3	Penggunaan Biaya Proses 2018		22.961.401.374
4	Saldo Akhir 2018		35.854.205.242
Jumlah		58.815.606.616	58.815.606.616

Saldo per 31 Desember 2018 berjumlah Rp.35.854.205.242 Saldo ini terdiri atas:

1. Saldo di Bank BNI Syariah : Rp35.565.536.736
2. Saldo Kas : Rp288.668.506

Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding

No	Jenis Perkara	Jumlah perkara	Biaya Proses	Jumlah
1	Peradilan Umum (Perdata)	6.758	150.000	Rp 1.013.700.000
2	Peradilan Agama (Perdata)	2.401	150.000	Rp 360.150.000
3	Peradilan Tata Usaha Negara	1.001	250.000	Rp 250.250.000
Jumlah				Rp 1.624.100.000



Reformasi Birokrasi dan Akses Terhadap Keadilan

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Reformasi Birokrasi (RB) bertujuan menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), mampu melayani publik, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Beberapa indikator keberhasilan RB di Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai berikut:

1. Berlanjutnya pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan pimpinan tinggi (Japati) di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya secara terbuka, transparan, bersaing dan akuntabel.
2. Penyerahan akreditasi penjaminan mutu di 4 (empat) lingkungan peradilan serta peluncuran *e-Court* Mahkamah Agung menuju peradilan elektronik oleh Ketua Mahkamah Agung yang dilaksanakan di Balikpapan pada tanggal 13 Juli 2018.
3. Pelaksanaan lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di 4 (empat) lingkungan peradilan, guna meningkatkan transparansi, akses terhadap keadilan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
4. Terpilihnya 7 (tujuh) pengadilan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) dari 4 (empat) lingkungan peradilan di Indonesia menerima apresiasi sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tanggal 10 Desember 2018.

- Berhasilnya melaksanakan seleksi CPNS menggunakan sistem rekrutmen yang ketat dan transparan diawali dengan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) secara terbuka menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*) yang bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Mahkamah Agung berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dengan menjadikan 3 (tiga) sasaran yaitu:

- Birokrasi bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi.
- Birokrasi efisien, efektif dan ekonomis.
- Birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas.

Tindak lanjut Mahkamah Agung dari 3 sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

No	Sasaran RB	Blue Print/ Road Map MA	Tindak lanjut MA	
1	Birokrasi bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi	Sudah diakomodasi	<ul style="list-style-type: none"> SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuaan) MOU dengan BPKP dan KPK. Diklat Bimtek 	<ul style="list-style-type: none"> Pembekalan CAKIM oleh Presiden Penerimaan CPNS yang transparan dan akuntabel
2	Birokrasi efisien, efektif dan ekonomis	Sudah diakomodasi	<ul style="list-style-type: none"> Kompetitif : Akreditasi Penjaminan Mutu. Penerapan Manajemen Transparan: sudah ada POLA Promosi dan Mutasi. e-Direktori Putusan SIPP Sikep 	<ul style="list-style-type: none"> e-Filing Komdanas SIMARI e-Monev e-Diklat e-Learning SIWAS
3	Birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas	Sudah diakomodasi	<ul style="list-style-type: none"> PTSP <i>e-Court</i> <i>One day publish</i> <i>One day minute</i> <i>One day service</i> Ruang tunggu yang nyaman 	<ul style="list-style-type: none"> Informasi yg transparan kepada pencari keadilan, pada ruang tunggu, paling tidak tentang prosedur, lamanya waktu, dan besarnya biaya. Adanya meja informasi dan meja pengaduan

Berdasarkan langkah strategis tersebut diatas, nilai RB Mahkamah Agung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang dapat dilihat dari perbandingan 4 (empat) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel Indeks Nilai Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dari tahun 2014 s.d 2018.

No	Komponen Pengungkit	Bobot	Nilai				
			2014	2015	2016	2017	2018
I	Komponen Pengungkit						
1	Manajemen Perubahan	5,00	3,31	3,85	3,74	3,84	5,00
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5,00	2,09	3,75	3,13	3,13	5,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	2,64	3,68	3,84	3,84	6,00
4	Penataan Tatalaksana	5,00	2,17	3,63	3,47	3,47	5,00
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	6,34	13,08	13,35	13,22	14,89

No	Komponen Pengungkit	Bobot	Nilai				
			2014	2015	2016	2017	2018
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,45	4,48	3,95	3,95	6,00
7	Penguatan Pengawasan	12,00	3,99	8,73	8,02	8,83	11,75
8	Peningkatan Pelayanan Publik	6,00	3,54	4,86	4,73	4,88	6,00
	Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	26,73	46,06	44,22	45,16	59,64
II	Komponen Hasil						
1	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00	14,09	13,72	*14,29	13,35	13,68
2	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	3,00	7,66	*8,23	8,32	7,20
3	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,5	6,00	*7,68	7,22	7,91
	Total Komponen Hasil (B)	40,00	21,59	27,38	*30,20	28,89	28,79
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100,00	48,33	73,44	74,42	74,05	88,43

Hasil dari 8 (delapan) area perubahan RB yang telah dicapai hingga saat ini adalah sebagai berikut:

Area I: Manajemen Perubahan

Sistem peradilan pidana terpadu *integrated criminal justice system* (ICJS) pada beberapa pengadilan di Indonesia, sebagai wadah untuk lembaga penegak hukum dalam melakukan komunikasi dan bertukar data secara elektronik, guna percepatan penanganan perkara oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan Lembaga Masyarakat.

Area II: Peraturan Perundang-Undangan

- PERMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum;
- PERMA Nomor 2 Tahun 2018 tentang Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum;
- PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik;
- PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif;
- PERMA Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak.

Area III: Penataan dan Penguatan Organisasi

- PERMA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- PERMA Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan;
- Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 722/SEK/SK/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Kode Wilayah untuk Penomoran Surat Pada 85 (delapan puluh lima) Pengadilan Baru;

- Pelaksanaan audit organisasi di lingkungan Mahkamah Agung oleh Tim Konsultan Independen Bidang SDM dan Organisasi diharapkan menghasilkan rekomendasi restrukturisasi organisasi dan transformasi kelembagaan di lingkungan Mahkamah Agung agar menjadi organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses.

Area IV: Penataan Ketatalaksanaan

- Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) pada 4 (empat) lingkungan peradilan;
- Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 4 (empat) lingkungan peradilan;
- Penyediaan layanan informasi pada 4 (empat) lingkungan peradilan;

Area V: Manajemen SDM

- Pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Japati), sesuai dengan Surat Pengumuman Nomor 10/Pansel/Japati/08/2018 tentang Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Mahkamah Agung Tahun 2018. Tujuan dari seleksi terbuka ini adalah untuk menempatkan SDM yang berkualitas dan berkompeten pada 8 (delapan) jabatan strategis di Mahkamah Agung dan jajaran pengadilan di bawahnya.
- Pelaksanaan Rekrutmen CPNS tahun 2018 secara transparan dan akuntabel.

Area VI: Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan MA oleh Kementerian Keuangan sebanyak 6 (enam) kali secara berturut-turut.
- Penganugerahan *National Procurement Award* kepada LPSE Mahkamah Agung oleh LKPP, untuk kategori Komitmen Penerapan Standar LPSE: 2014

Area VII: Pengawasan

- Pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) khususnya pada 23 (dua puluh tiga) satker pengadilan terpilih, yang bermuara dengan penganugerahan predikat ZI menuju WBK kepada 7 (tujuh) pengadilan pada 4 (empat) lingkungan peradilan, oleh Wakil Presiden pada tanggal 10 Desember 2018.

Area VIII: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Peresmian operasional 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru pada 3 (tiga) lingkungan peradilan tanggal 22 Oktober 2018, dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat.
- Penerapan *e-Court* di pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, demi terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.
- Lomba implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang memacu pengadilan untuk berkompetisi memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat, baik dari segi sarana, prasarana dan kualitas pelayanan.

Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L yang memiliki komitmen mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada tanggal 10 Desember 2018, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali menerima anugerah sebagai Pemimpin Perubahan bersama dengan 6 (enam) pimpinan kementerian/lembaga lain yaitu Moermahadi Soerja Djanegara (Ketua BPK), Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM), Muhammad Prasetyo (Jaksa Agung), Tito Karnavian (Kapolri) dan Airlangga Hartarto (Menteri Perindustrian). Penghargaan tersebut merupakan apresiasi atas keberhasilan sejumlah pengadilan dalam memperoleh WBK.

AKSES TERHADAP KEADILAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Akses Terhadap Keadilan

Peresmian dan Pembukaan Pengadilan Baru

Pada tanggal 22 Oktober 2018 Ketua Mahkamah Agung meresmikan dan membuka 85 pengadilan baru yang terdiri atas 30 pengadilan negeri, 50 pengadilan agama, 3 mahkamah syar'iyah, dan 2 pengadilan tata usaha negara di Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Keberadaan pengadilan baru dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat mengakses pengadilan di berbagai wilayah Indonesia sehingga dengan jarak yang semakin dekat dapat mengurangi biaya, waktu, dan tenaga para pencari keadilan yang memiliki kepentingan hukum di pengadilan.

Aplikasi *e-Court*

Aplikasi *e-Court* memiliki fitur pendaftaran perkara online (*e-Filing*), pembayaran panjar biaya online (*e-SKUM*) dan pemanggilan secara elektronik (*e-Summons*). Pengguna Terdaftar pada aplikasi *e-Court* untuk saat ini baru bisa dilakukan oleh Advokat, Hingga saat ini, aktivasi *e-Court* pada lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara telah mencapai angka 100 persen.

Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana, Mediasi dan Diversi

Gugatan Sederhana

Tahun 2018 pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama telah menyelesaikan perkara gugatan sederhana yaitu perkara dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebanyak **6.469** perkara. Jumlah perkara gugatan sederhana tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2017 yang berjumlah **2.135** perkara.

Mediasi

Pada tahun 2018 jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme mediasi di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebanyak **5.306** Perkara. Jumlah keberhasilan ini mengalami kenaikan dari tahun 2017 lalu sebanyak **2.660** perkara atau sebesar 100,5%.

Diversi

Keberhasilan proses diversi memberikan manfaat kepada pencari keadilan karena dapat memulihkan rasa keadilan pihak korban, pelaku akan memperbaiki diri, dan proses persidangan tidak perlu dilanjutkan sampai pada putusan hakim. Pada tahun 2018 jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui proses diversi pada pengadilan negeri sebanyak 273 perkara dan pada mahkamah syar'iyah sebanyak 47 perkara.

Penyederhanaan Format Putusan Mahkamah Agung

Penerapan PERMA Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (*Template*) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung mampu mendukung upaya percepatan penyelesaian putusan secara signifikan di Mahkamah Agung dengan jumlah perkara yang diminutasi tahun 2018 meningkat 14,28% dari tahun 2017 dan publikasi putusan Mahkamah Agung meningkat 19,07% dari tahun 2017. Putusan dengan format yang sederhana juga mampu mengurangi penggunaan kertas pada saat penggandaan putusan sehingga mendukung program *paperless*.

Penerbitan izin sidang dengan hakim tunggal dan pengalihan persidangan

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim. Saat ini beberapa pengadilan mengalami kekurangan Hakim sehingga jika prinsip ini diterapkan secara kaku akan menghambat proses persidangan di pengadilan. Oleh karena itu, Ketua Mahkamah Agung telah menerbitkan SK KMA tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal untuk 24 (dua puluh empat) pengadilan negeri dan 54 (lima puluh empat) pengadilan agama / mahkamah syar'iyah. Selain itu, Mahkamah Agung juga telah menunjuk beberapa pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus 111 (seratus sebelas) perkara tindak pidana khusus (terorisme, korupsi, narkoba, dan lain-lain) dan 11 (sebelas) perkara tindak pidana umum sesuai dengan permohonan pengalihan tempat persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP

Peningkatan Pelayanan Publik

Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

Pelaksanaan APM pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah mencapai angka 100 persen, kecuali pengadilan yang baru beroperasi pada bulan Oktober 2018. Sedangkan APM pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, jumlah peradilan militer yang

sudah terakreditasi adalah sebanyak 17 pengadilan dari 23 pengadilan militer di seluruh Indonesia dan peradilan tata usaha negara yang sudah terakreditasi adalah sebanyak 20 pengadilan dari 34 pengadilan tata usaha negara di seluruh Indonesia.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pada tahun 2018 seluruh pengadilan pada 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung telah menerapkan PTSP. Layanan pokok PTSP di pengadilan meliputi permohonan infomasi, pendaftaran perkara, pembayaran biaya, penyerahan produk pengadilan, dan pengaduan. Sementara itu, layanan penunjang PTSP dilakukan oleh penyedia jasa eksternal antara lain posbakum, bank, PT Pos dan pihak lainnya yang telah mengadakan kerja sama secara resmi dengan pengadilan.

Layanan Peradilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Layanan Pembebasan Biaya Perkara

Tabel realisasi Layanan Pembebasan Biaya Perkara tahun 2018

No	Lingkungan Peradilan	Jumlah Layanan (Perkara)
1	Peradilan Umum	1.424
2	Peradilan Agama	15.541
3	Peradilan Tata Usaha Negara	9

Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Tabel Data Layanan Posbakum di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2018:

No	Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Posbakum	Jumlah Layanan (Orang)
1	Peradilan Umum	2018	352	10.019
2	Peradilan Agama	2018	230	199.880
3	Peradilan Tata Usaha Negara	2018	28	308

Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Tabel Data Layanan Sidang di Luar gedung Pengadilan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Militer tahun 2018

No	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara Diselesaikan
1	Peradilan Umum	378
2	Peradilan Agama	70.817
3	Peradilan Militer	353

Pelayanan Terpadu Sidang Keliling

Program sidang keliling yang dilakukan secara terpadu bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil) dan Kementerian Agama (KUA) dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh identitas hukum berupa akta nikah dan akta kelahiran. Berikut adalah data pelayanan terpadu sidang keliling yang dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah pada tahun 2018:

Tabel Data Pelayanan Terpadu Sidang Keliling di Peradilan Umum dan Peradilan Agama Tahun 2018

No	Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Perkara Pengesahan / Itsbat Nikah
1	Peradilan Umum	2018	378
2	Peradilan Agama	2018	5.465

Sidang di Luar Negeri pada Konsulat Jenderal RI (KJRI)

Pada tahun 2018, sidang di luar negeri dilaksanakan di KJRI Kota Kinabalu, Malaysia sebanyak 2 kali dengan jumlah 520 perkara.

Tabel Data pelaksanaan sidang di Luar Negeri yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Tahun	Waktu Pelaksanaan	Kota, Negara	Rekapitulasi Sidang Itsbat Nikah				Total Perkara Disidangkan
			Dikabulkan	Ditolak	Dicabut	Digugurkan	
2018	2-4 April 2018	KJRI Kota Kinabalu Tahap I, Malaysia	251	0	0	9	260
	3-5 Desember 2018	KJRI Kota Kinabalu Tahap II, Malaysia	240	0	8	12	260
Jumlah			491	0	8	21	520

Keterbukaan Informasi Publik

Pelayanan Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya memiliki website yang menyajikan informasi bagi masyarakat terkait semua hal tentang pelayanan pengadilan.

Pelayanan Meja Informasi dan Meja Pengaduan dalam PTSP

Meja informasi berfungsi sebagai pelayan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi seputar hal-hal yang berkaitan dengan pengadilan, Berikut adalah jumlah data Pengguna layanan meja informasi dan meja pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya :

No	Informasi dan Pengaduan	Jumlah Layanan
1.	Layanan Informasi Mahkamah Agung	1.411
2.	Layanan Pengaduan Mahkamah Agung	58
3.	Layanan Informasi Badilum	57.604
4.	Layanan Pengaduan Badilum	824
5.	Layanan Informasi Badilag	140.392
6.	Layanan Pengaduan Badilag	196
7.	Layanan Informasi Badilmiltun (Peradilan Militer)	36
8.	Layanan Pengaduan Badilmiltun (Peradilan Militer)	1
9.	Layanan Informasi Badilmiltun (Peradilan TUN)	545
10.	Layanan Pengaduan Badilmiltun (Peradilan TUN)	33

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Mahkamah Agung terus melakukan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk meningkatkan keandalan SIPP dalam pengadministrasian perkara secara elektronik. Beberapa modul yang dikembangkan adalah sebagai berikut :

- Modul Gugatan Sengketa Pemilu untuk Peradilan Tata Usaha Negara
- Modul Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah untuk Peradilan Agama
- Integrasi SIPP dengan e-Court
- Modul e-Payment SIPP
- Aplikasi e-SKUM
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Manajemen Sumber Daya Manusia

PROGRAM PEMBARUAN

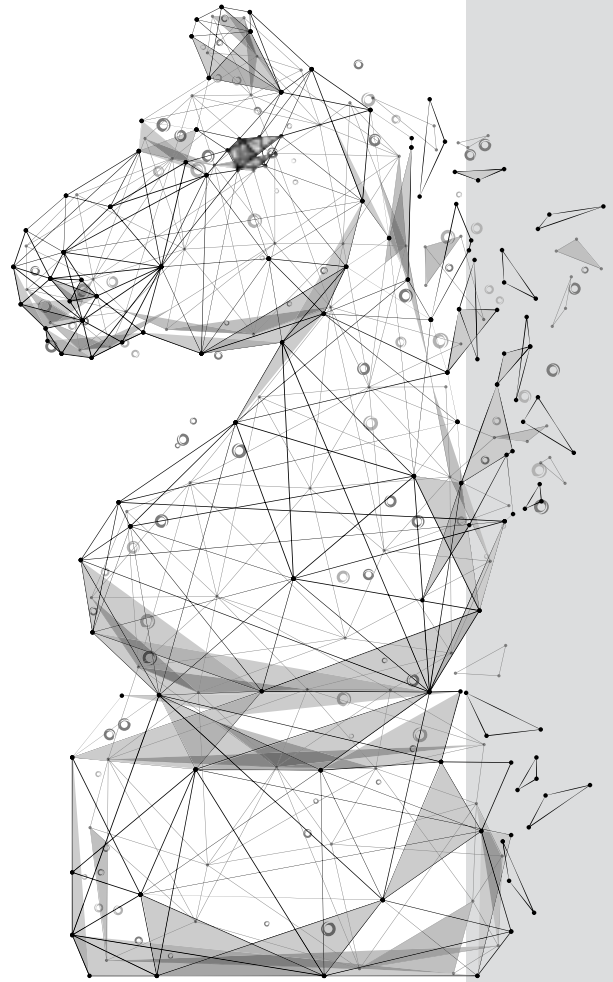
Penyempurnaan Sistem Informasi Kepegawaian

Pada tanggal 20 Desember 2018 Ketua Mahkamah Agung meresmikan peluncuran integrasi manajemen SDM berbasis kompetensi ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung versi 3.1.0. Acara peresmian tersebut merupakan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan EU-UNDP Sustain.

SIKEP Versi 3.1.0 sebagai versi terakhir merupakan pengembangan versi 2 dengan fitur-fitur tambahan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan manajemen SDM, dari perencanaan kebutuhan pegawai, rekrutmen, pengembangan kompetensi, pengelolaan karier, penghargaan, hukuman disiplin, dan pemberian hak-hak pengelolaan pensiun. Pengembangan SIKEP versi 3.1.0 sepenuhnya dilaksanakan oleh pegawai Mahkamah Agung yang tergabung dalam satuan tugas pengembangan aplikasi SIKEP.

Aplikasi SIKEP versi 3.1.0 memiliki keunggulan sebagai berikut:

1. kemudahan akses;
2. kecepatan informasi;
3. ketepatan informasi;
4. keamanan informasi.



Pembekalan CPNS Calon Hakim

Mahkamah Agung melaksanakan pembekalan kepada 1.591 CPNS calon hakim di lingkungan Mahkamah Agung tahun 2018, bertempat di Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Megamendung, Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 21 Januari 2018 yang dihadiri oleh Presiden RI, Ketua Mahkamah Agung dan pimpinan Mahkamah Agung. Presiden Joko Widodo memberikan pengarahannya terkait pentingnya integritas dalam mengemban jabatan hakim. Presiden juga menyampaikan bahwa rakyat Indonesia mengharapkan para calon hakim nantinya bisa menjadi hakim yang adil, profesional, berintegritas, bermartabat, dan mampu memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

Penyusunan Standar Kompetensi

Dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan tahun 2010–2035 menggariskan bahwa pengelolaan SDM pada Mahkamah Agung harus dilakukan secara profesional berbasis kompetensi. Oleh karena itu, mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan, disusunlah standar kompetensi jabatan untuk Mahkamah Agung dengan menggunakan tiga komponen kompetensi yakni: kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural dan kompetensi teknis.

Mutasi dan Promosi berbasis Sistem *Monitoring Kinerja Hakim (MIS/SIMTALAK)*

Proses promosi dan mutasi pada semua Direktorat Jenderal Badan Peradilan pada empat lingkungan peradilan, selain berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48/KMA/SK/II/2017, tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan juga telah mempertimbangkan penyelesaian tugas dan fungsi utama hakim dalam penyelesaian perkara melalui Monitoring Implementasi SIPP (MIS) dan Sistem Informasi Manajemen Ketatalaksanaan (SIMTALAK).

Pengalihan Seluruh Arsip Kepegawaian Hakim ke dalam Bentuk Arsip Elektronik

Dalam rangka memodernisasi penyimpanan arsip, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah melakukan penataan 5.283 arsip secara elektronik dan mengintegrasikannya dalam SIKEP guna mendukung sistem kearsipan yang lebih akurat dan efisiensi ruang kearsipan. Sistem ini akan dikembangkan juga pada direktorat jenderal badan peradilan lainnya.

Perubahan Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu

Mahkamah Agung telah menetapkan perubahan durasi pelatihan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu dari 106 minggu menjadi 65 minggu dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 133/KMA/SK/VII/2018 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu. Perubahan durasi pelatihan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi krisis kekurangan jumlah hakim dengan tidak mengurangi kualitas kompetensi para peserta didik calon hakim.

Penyusunan Sasaran Rencana Strategis 2020--2024 Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung

Menindaklanjuti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Hasil Rumusan Kamar Kesekretariatan subbagian Badan Litbang Diklat Kumdil terkait pengembangan Rencana Strategis (Renstra) 2020–2024, Badan Litbang Diklat Kumdil telah menyusun sasaran/target Renstra 2020–2024 untuk meningkatkan jumlah peserta pelatihan melalui penambahan jumlah kelas dan durasi pelatihan untuk pembelajaran klasikal.

Penyempurnaan Sistem Informasi Kediklatan dan Pengembangan Sistem *Monitoring* dan Evaluasi Secara Elektronik (*e-money*)

Monitoring dan evaluasi program pelatihan merupakan kegiatan pengecekan, pemantauan, dan pengevaluasian jalannya pelaksanaan pengembangan SDM yang sedang berlangsung serta proses untuk menilai kualitas dengan menggunakan standar kriteria keberhasilan dan aktivitas proses pengembangan SDM. Metode yang digunakan Badan Litbang Diklat Kumdil dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi adalah Model Kirkpatrick.

PENGADAAN SDM

Data seluruh aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya adalah sebagai berikut:

Tabel Data pegawai Mahkamah Agung RI

Jabatan	MA	Peradilan Umum		Peradilan Agama		Peradilan Militer		Peradilan TUN		Jml
		Banding	Pertama	Banding	Pertama	Banding	Pertama	Banding	Pertama	
Hakim Agung	48									48
Hakim Tinggi Yustisial	47									47
Hakim Yustisial	138									138
Hakim		733	2.983	380	2.809	31	104	44	298	7.382
Panitera		690	4.753	324	2.999	24	63	91	330	9.259
Jurusita			2.096		1.474			2	97	3.669
Tenaga Non Teknis	1.231	857	4.364	611	2.562	129	286	70	302	10.412
Jumlah	1.464	2.280	14.196	1.315	9.844	184	453	207	1.027	30.955

Berdasarkan data tersebut, jumlah SDM yang dimiliki Mahkamah Agung masih belum memenuhi kebutuhan, sehingga pada tahun 2018, Mahkamah Agung telah melakukan pengadaan SDM sebagai berikut:

Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Calon Hakim

a) Kebutuhan Hakim

Tabel Data Kebutuhan Hakim

No.	Kebutuhan	Jumlah	Ket
1	Hakim yang pensiun tahun 2018	192	
2	Prediksi hakim yang akan pensiun tahun 2019	348	
3	Formasi yang tidak terisi pada rekrutmen tahun 2017	106	
Jumlah kekurangan		646	

b) Kebutuhan Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Umum (panitera, panitera muda, panitera pengganti, dan juru sita)

Tabel Kondisi Kepaniteraan saat ini dan kekurangannya

No.	Uraian	Satker	Jumlah saat ini	Seharusnya	Kekurangan	Pensiun	
						2019	2020
1	Struktural PT	30	149	153	4	19	13
2	PP PT		534	1.098	564	51	68
3	Struktural PN	382	1.507	1.610	103	76	83
4	PP PN		3.205	5.437	2.232	142	173
5	JS		748	1.448	700	35	31
Jumlah			6.143	9.746	3.603	323	368

c) Kebutuhan PNS

Tabel Jumlah Kebutuhan PNS

No.	Kebutuhan	Jumlah	Ket
1	Kebutuhan PNS berdasarkan ABK untuk seluruh satuan kerja	26.940	
2	Bezetting PNS (yang saat ini ada) seluruh satuan kerja	15.403	
Jumlah kekurangan		11.537	

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Keputusan Nomor 65 Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 menetapkan bahwa Mahkamah Agung diberikan alokasi formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil sebanyak 1.052 (seribu lima puluh dua) formasi, sedangkan untuk alokasi formasi calon hakim untuk tahun 2018 tidak ada formasi.

Berdasarkan hasil seleksi, yang dinyatakan lulus seleksi sebanyak 1.052 orang dengan perincian sebagai berikut:

Tabel Data Kelulusan CPNS Mahkamah Agung

NO	JABATAN	LULUS SKD / IKUT SKB					LULUS SKB					KELULUSAN AKHIR				
		umum	cumlaude	disabilitas	papua	total	umum	cumlaude	disabilitas	papua	total	umum	cumlaude	disabilitas	papua	total
1	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	137	42	1	0	180	136	42	1	0	179	85	14	1		100
2	Analisis Perkara Peradilan	391	118	9	5	523	384	116	9	5	514	275	40	7	3	325
3	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	392	135	12	8	547	383	133	12	8	536	333	45	8	4	390
4	Pengelola Sistem Dan Jaringan	193	0	1	2	196	192	0	1	2	195	177		4	3	184
5	Pranata Komputer Ahli Pertama	83	18	1	1	103	83	18	1	1	103	44	6	2	1	53
Jumlah		1.196	313	24	16	1.549	1.178	309	24	16	1.527	914	105	22	11	1.052

d) Kebutuhan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Militer

Pada tahun 2018 Dirjen Badilmiltun atas persetujuan Sekretaris Mahkamah Agung telah merekrut sebanyak 46 orang personel yang ditugaskan oleh Panglima TNI untuk mengisi jabatan yang tersedia, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) tenaga teknis (panitera) sebanyak 21 orang; dan
- 2) tenaga nonteknis sebanyak 25 orang.

Pada tahun 2018 terdapat 6 orang hakim yang pensiun karena habis masa tugasnya dan 1 orang panitera pengganti yang pensiun karena meninggal dunia.

Rekrutmen Calon Hakim Ad Hoc

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pada tahun 2018, Mahkamah Agung melaksanakan rekrutmen calon hakim Ad Hoc Tipikor untuk Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Berdasarkan proses seleksi dari sebanyak 347 orang yang mendaftar, dinyatakan lulus sebanyak 5 orang, terdiri atas hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi sebanyak 3 orang dan hakim Ad Hoc Pengadilan Negeri sebanyak 2 orang.

Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

Untuk mengisi kekurangan pengisian formasi Hakim Ad Hoc PHI pada Pengadilan Tingkat Pertama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2018 mengadakan seleksi calon hakim Ad Hoc PHI dengan jumlah pelamar sebanyak 139 orang dan yang dinyatakan lulus sebanyak 47 orang.

PENGEMBANGAN SDM

Mahkamah Agung pada tahun 2018 telah menyelenggarakan kegiatan pembinaan teknis dan administrasi yudisial di 11 (sebelas) provinsi dengan jumlah peserta sebanyak 2.430 orang. Kegiatan pembinaan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM di bidang teknis dan administrasi yudisial pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

Selain kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan Mahkamah Agung, peningkatan kapasitas pengembangan SDM dilaksanakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung sebagai unit eselon I yang melaksanakan fungsi di bidang pendidikan dan pelatihan bagi aparatur. Tahun 2018 Badan Litbang Diklat Kumdil telah melatih sebanyak 4.278 orang atau sebesar 14,1% dari jumlah keseluruhan yang dimiliki Mahkamah Agung, yaitu sebanyak 30.343 orang (data tahun 2017).

Pengembangan SDM di Bidang Teknis Peradilan

Pada tahun 2018, jumlah persentase tenaga teknis yang berhasil diberi pelatihan sebesar 107,43% atau sebanyak 2.311 orang dari target sebanyak 2.151 orang. Jumlah tenaga teknis yang mengikuti pelatihan tersebut terdiri atas calon hakim sebanyak 1.585 orang dan hakim sebanyak 726 orang. Perincian jenis pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:

Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu

Tabel Data Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu PPC

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Umum, Agama dan TUN	1.684	1.585	93,46
2	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Militer	40	40	100

Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Prioritas Nasional

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Prioritas Nasional

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	80	64	87,50
2	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup	80	82	102,50
3	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga	40	37	92,50

Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi (Tipikor, PHI, Perikanan, Ekonomi Syariah, dan Mediator)	240	252	105

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional/Pendalaman Materi

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional/Pendalaman Materi

No	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1	Pendidikan dan Pelatihan Hakim Pilkada	40	40	100
2	Pendidikan dan Pelatihan Hakim Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	40	41	102,50
3	Pendalaman Materi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	38	38	100
4	Pendalaman Materi Tindak Pidana Pemilu	38	38	100
5	Pendalaman Materi Ekonomi Syariah	49	49	100
6	Pendalaman Materi Fiktif – Positif	43	43	100
Jumlah		248	249	100,40

Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Umum Militer bagi Tenaga Teknis di Peradilan Militer

Tabel Data Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Umum Militer bagi Tenaga Teknis di Peradilan Militer

No	Jenis Pendidikan	Jumlah (Peserta)	Jumlah Kelulusan	Capaian (%)
1	Sesko Angkatan	1	1	100
2	Susjabkimmil	12	12	100
3	Diklapa II	2	2	100

Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Militer

Tabel Data Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Militer

No	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1	Bintek Hakim	30	31	103
2	Bintek Panitera	30	32	106
3	Bintek SIPP	39	46	117

Diklat Teknis/ *Workshop* oleh KY di Lingkungan Peradilan Militer

Tabel Diklat Teknis/Workshop di Lingkungan Peradilan Militer

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1	Diklat/Workshop Pemaknaan KEPPH masa kerja 0-8 tahun	2	2	100
2	Diklat/Workshop Pemantapan KEPPH masa kerja 8-15 tahun	6	6	100
3	Diklat Pengawasan Hakim	5	5	100

Diklat Teknis Pimpinan Pengadilan oleh Sustain - UNDP

Tabel Diklat Teknis Pimpinan Pengadilan oleh Sustain - UNDP

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1	Diklat Sertifikasi ToT bagi Calon Pengajar Cakim	5	5	100
2	Diklat Teknis Pimpinan Pengadilan (Kepala) di Manado	10	10	100
3	Diklat Teknis Pimpinan Pengadilan (Wakil) di Surabaya	10	10	100
4	Diklat Hakim Tinggi <i>Trainer</i> (ToT) di Manado	3	3	100
5	Diklat Hakim Tinggi <i>Trainer</i> (ToT) di Surabaya	3	3	100

Temu Wicara (Kerja Sama Diklat Teknis dengan Bank Indonesia)

Tabel Data Temu Wicara

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1	Temu Wicara di Banda Aceh	1	1	100
2	Temu Wicara di Malang	1	1	100
3	Temu Wicara di Bandung	1	1	100
4	Temu Wicara di Denpasar	1	1	100

Kerja Sama Pelatihan dan Partisipasi Pelatihan

Badan Litbang Diklat Kumdil telah menjalin kerja sama dengan pelbagai kementerian/ lembaga, baik pemerintah maupun nonpemerintah dalam dan luar negeri di bidang pengembangan kompetensi SDM Mahkamah Agung. Sebanyak 761 (tujuh ratus enam puluh satu) orang telah mengikuti pelbagai kegiatan pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan lainnya, yaitu sebagai berikut:

Kerja Sama Mahkamah Agung dengan Kejaksaan Agung

Tabel Kerja sama Diklat dengan Kejaksaan Agung

No.	Bentuk Kerja Sama	Peserta
1.	Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bagi Aparat Penegak Hukum (3 Angkatan)	18 hakim tingkat pertama
2.	Diklat Terpadu Kebakaran Hutan dan Lahan bagi Hakim, Jaksa, Polisi, dan PPNS	17 orang hakim tingkat pertama Peradilan Umum
3.	Diklat Terpadu Mineral dan Batubara	17 orang hakim tingkat pertama Peradilan Umum

Kerja Sama Mahkamah Agung dengan *Judicial Sector Support Progame (JSSP)*

Tabel Kerja sama Diklat dengan JSSP

No.	Bentuk Kerja Sama	Peserta
1.	Diskusi Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu	20 orang

Kerja Sama Mahkamah Agung dengan *Kemitraan (Partnership)*

Tabel Kerja sama Diklat dengan Kemitraan

No.	Bentuk Kerja Sama	Peserta
1.	Diklat Penguatan Penanganan dan Pengelolaan Bukti Elektronik dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi	18 orang
2.	Seminar Pemulihan Aset Tindak Pidana	34 orang

Kerja Sama Mahkamah Agung dengan *Support to the Justice Reform in Indonesia (SUSTAIN)*

Tabel Kerja sama Diklat dengan SUSTAIN

No.	Bentuk Kerja Sama	Peserta
1.	<i>Focus Group Discussion</i> Buku Panduan Teknis bagi Aparat Penegak Hukum di Bidang Perikanan Ilegal, tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur (IUUF)	3 orang hakim tinggi Badan Litbang Diklat Kumdil
2.	Diklat Sertifikasi <i>Training of Trainers (ToT)</i> bagi Calon Pengajar Calon Hakim dari Empat Lingkungan Peradilan	50 orang hakim tingkat banding dan hakim tingkat pertama dari 4 lingkungan peradilan
3.	Diklat Terpadu Penanganan Gugatan Perdata Lingkungan Hidup	14 orang hakim tingkat pertama lingkungan Peradilan Umum di wilayah Papua
4.	<i>Focus Group Discussion</i> Diklat Terpadu Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	3 hakim PN Tanjung Pinang
5.	<i>Focus Group Discussion</i> Penyusunan Buku Panduan bagi Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti	6 orang pejabat struktural eselon II dan III 14 orang hakim tingkat banding dan tingkat pertama
6.	<i>Focus Group Discussion</i> Penyusunan Buku Panduan bagi Panitera Pengganti dan Juru Sita / Juru Sita Pengganti	11 orang hakim tingkat banding dan tingkat pertama dan 1 orang panitera muda
7.	Diklat Sertifikasi Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	Ambon: 7 orang hakim tingkat pertama lingkungan Peradilan Umum wilayah Maluku Malang: 10 orang hakim tingkat pertama lingkungan Peradilan Umum wilayah Malang dan sekitarnya

No.	Bentuk Kerja Sama	Peserta
8.	Diklat Terpadu Penanganan Tindak Pidana Perikanan di Pesisir Pantai Utara Pulau Jawa	18 orang hakim tingkat pertama lingkungan Peradilan Umum
9.	Monitoring dan Evaluasi serta Mentoring pada Diklat Berkelanjutan bagi Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti di wilayah PT Medan, PT Banjarmasin, dan PT Pontianak	9 orang hakim tinggi lingkungan Peradilan Umum
10.	Diklat Kepemimpinan Teknis Pimpinan Pengadilan bagi Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di Manado	38 orang pimpinan pengadilan dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer
11.	Diklat Kepemimpinan Teknis Pimpinan Pengadilan bagi Wakil Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di Surabaya	40 orang pimpinan pengadilan dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer
12.	<i>Training of Trainers</i> Diklat Pimpinan Pengadilan	20 orang widyaiswara/ pengajar diklat pimpinan pengadilan.

Kerja Sama Mahkamah Agung dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tabel Kerja sama Pelatihan dengan OJK

No.	Bentuk Kerja Sama	Peserta
1.	Pelatihan Hakim di bidang Kebanksentralan dan Sektor Jasa Keuangan	Denpasar: 40 orang hakim tingkat banding dan hakim tingkat pertama 4 lingkungan peradilan di wilayah Bali Banda Aceh: 40 orang hakim tingkat banding dan hakim tingkat pertama 4 lingkungan peradilan di wilayah Aceh Malang: 40 orang hakim tingkat banding dan hakim tingkat pertama 4 lingkungan peradilan di wilayah Jawa Timur Bandung: 37 orang hakim tingkat banding dan hakim tingkat pertama 4 lingkungan peradilan di wilayah Jawa Barat

Kerja Sama Mahkamah Agung dengan U.S. Department of Justice Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (OPDAT)

Tabel Kerja sama Pelatihan dengan OPDAT

No.	Bentuk Kerja Sama	Peserta
1.	Pelatihan Komputer Forensik bagi Hakim dan Jaksa di Asia Tenggara	3 orang hakim tingkat pertama lingkungan Peradilan Umum

Kerja Sama Mahkamah Agung dengan Kepolisian

Tabel Kerja sama Diklat dengan Kepolisian

No.	Bentuk Kerja sama	Peserta
1.	Diklat Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). 9 Angkatan @ 5 orang	20 orang hakim tingkat pertama dari lingkungan Peradilan Umum

KERJA SAMA MAHKAMAH AGUNG DENGAN KOMISI YUDISIAL

Tabel Kerja sama Diklat dengan Komisi Yudisial

No.	Bentuk Kerja Sama	Peserta
1.	Pelatihan Tematik Tindak Pidana Pemilu	Medan: 42 orang hakim tingkat banding dan tingkat pertama dari lingkungan Peradilan Umum wilayah Sumatera Utara Surabaya: 42 orang hakim tingkat banding dan tingkat pertama dari lingkungan Peradilan Umum wilayah Jawa Timur

KERJA SAMA MAHKAMAH AGUNG DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Tabel Kerja sama Lokakarya dengan Kementerian Keuangan

No.	Bentuk Kerja sama	Peserta
1.	Lokakarya Tindak Pidana Perpajakan. 2 gelombang	60 orang hakim tingkat pertama lingkungan Peradilan Umum

PENGEMBANGAN SDM DI BIDANG NONTeknis PERADILAN

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan (Pusdiklat Menpim) mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan dan membina diklat teknis dan administrasi pengadilan kepada tenaga teknis yudisial dan administrasi peradilan yang berhubungan dengan penjurangan pangkat dan jabatan.

Capaian kinerja Pusdiklat Menpim dalam mendidik dan melatih tenaga teknis yudisial dan administrasi peradilan tahun 2018 sebesar 104.57% atau sebanyak 2.127 orang dari target kinerja 2.034 orang. Pendidikan dan pelatihan pengembangan SDM dibidang non teknis peradilan sebagai berikut:

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan

Tabel Diklat Dasar

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1	Pendidikan dan Pelatihan Dasar	1.591	1.584	99,56

Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Tabel Diklat Kepemimpinan

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II	40	*)	
2	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III	120	120	100
3	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV	200	197	98,5

Ket: *) tidak dapat dilaksanakan karena waktu pelaksanaan oleh LAN (Lembaga Administrasi Negara) tidak mencukupi

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

Tabel Diklat Fungsional

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional (Peneliti, Auditor dan Auditor Kepegawaian)	40	17	42,50

Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Tabel Diklat Teknis

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1	Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran	100	105	105
2	Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	70	70	100

Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pengadilan

Tabel Diklat Manajemen Pengadilan

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1	Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan Pengadilan	60	181	301,66

PROMOSI DAN MUTASI

Pengangkatan dan Pemindahan dalam Jabatan

Mahkamah Agung pada tahun 2018 telah melaksanakan promosi dan mutasi bagi pegawai teknis dan nonteknis sebagai berikut:

Badan Urusan Administrasi

Badan Urusan Administrasi (BUA) telah melaksanakan promosi dan mutasi sebanyak 5.903 orang dengan perincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel Promosi dan mutasi pegawai nonteknis

No.	Pegawai Nonteknis	Jumlah
1	Promosi dan Mutasi	583
2	Pemberhentian Jabatan Struktural	217
3	Pemindahan PNS	108
4	Pindah Melimpah	53
5	Kenaikan Pangkat	4.942
Jumlah		5.903

Direktorat Jenderal Peradilan Umum

Direktorat Jenderal Peradilan Umum telah melaksanakan promosi/mutasi Hakim dan Panitera dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel Promosi Hakim Peradilan Umum

No	Tenaga Teknis	Jumlah
1	Hakim PN	682
2	Hakim PT	87
3	Hakim Ad Hoc	78
Jumlah		847

Tabel Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Pengadilan Tinggi

No.	Jabatan	Tahun 2018
1	Promosi Struktural PT	11
2	Pengangkatan PP PT	32
3	Mutasi Struktural PT	5
4	Mutasi PP PT	6
Jumlah		54

Tabel Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri

No	Jabatan	Tahun 2018
1	Promosi Struktural PN	200
2	Mutasi Struktural PN	99
3	Pengangkatan PP PN	23
4	Pengangkatan Jurusita	36
6	Mutasi PP PN	78
7	Mutasi JS PN	4
8	Lepas Jabatan	6
Jumlah		446

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Direktorat Jenderal Peradilan Agama telah melaksanakan Rapat Tim Promosi dan Mutasi dan Rapat Pimpinan sebagaimana tabel berikut:

Tabel Promosi/Mutasi Hakim Peradilan Agama

No.	TPM/Rapat Pimpinan	Tanggal	Jumlah
1	Rapat TPM	26-1-2018	213
2	Rapim MA	23-4-2018	13
3	Rapim TPM	8-8-2018	376
4	Rapat TPM (PA Baru)	25-9-2018	185
5	Rapim MA	26-10-2018	67
Jumlah			854

Tabel Promosi/Mutasi Kepaniteraan

No.	TPM/Baperjakat	Tanggal	Jumlah
1	Baperjakat	28-08-2018	23
2	Rapat TPM (PA Baru)	25-09-2018	250
3	Baperjakat	13-11-2018	232
Jumlah			505

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Direktorat Jenderal Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara telah melaksanakan Rapat Tim Promosi dan Mutasi (TPM) dan Rapat Pimpinan (Rapim) sebagaimana tabel berikut:

Tabel Hakim Peradilan Militer

No.	Jabatan	Jumlah
1	Hakim Utama	3 orang
2	Ka Dilmilti	1 orang
3	Waka Dilmilti	1 orang
4	Hakim Tinggi	10 orang
5	Kadilmil	5 orang
6	Wakadilmil	9 orang
7	Hakim	40 orang
Jumlah		69 orang

Tabel Panitera Peradilan Militer

No.	Pengadilan	Jumlah
1	Dilmiltama	3 orang
2	Dilmilti I Medan	5 orang
3	Dilmilti II Jakarta	5 orang
4	Dilmilti III Surabaya	4 orang
5	Dilmil	35 orang
Jumlah		52 orang

Tabel Hakim Peradilan Tata Usaha Negara

No.	TPM/Rapat Pimpinan	Tanggal	Jumlah
1	Rapim MA	23-04-2018	2
2	Rapim MA (PTUN Baru)	25-09-2018	12
3	Rapim MA	27-11-2018	57
Jumlah			71

Tabel Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara

No	TPM/Baperjakat	Tanggal	Jumlah
1	TPM	25-05-2018	32
2	TPM	18-09-2018	37
3	TPM (PTUN Baru)	25-09-2018	11
Jumlah			80

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

Pada tahun 2018, Mahkamah Agung telah menyelenggarakan dua kegiatan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi. Kegiatan pertama dilakukan pada tanggal 15 Maret sampai dengan 17 Mei 2018 dan kegiatan kedua dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus sampai dengan 14 November 2018. Adapun kegiatan seleksi terbuka tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Daftar nama jabatan yang dilelang pada kegiatan periode 1 tahun 2018

Tabel Nama Jabatan yang dilelang periode 1

No.	Nama Jabatan	Jumlah peserta	Jumlah Formasi	Tanggal Pelaksanaan
1	Kepala Pusat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Kumdil	7	1	5 Maret s.d. 17 Mei 2018
2	Inspektur Wilayah Badan Pengawasan	4	1	sda.
3	Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	11	1	sda.
4	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara	4	1	sda.
5	Kepala Biro Perlengkapan	7	1	sda.

Daftar Nama Jabatan yang dilelang pada kegiatan periode 2 tahun 2018

Tabel Nama Jabatan yang dilelang periode 2

No.	Nama Jabatan	Jumlah peserta	Jumlah Formasi	Tanggal Pelaksanaan
1	Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	8	1	3 Agustus s.d. 18 November 2018
2	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama	23	1	sda.
3	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan	10	1	sda.
4	Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi	9	1	sda.
5	Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi	12	1	sda.
6	Sekretaris Pengadilan (Eselon II.a)	7	1	sda.
7	Sekretaris Pengadilan (Eselon II.b)	23	2	sda.

Pengangkatan Pejabat Fungsional Tertentu

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung telah mengangkat pejabat fungsional tertentu sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) orang dengan perincian sebagai berikut:

Tabel Pengangkatan Pejabat Fungsional tertentu

Nama Jabatan	Pengangkatan	Kenaikan Jabatan	Pengangkatan Kembali	Jumlah
Analisis Kepegawaian	0	1	0	1
Arsiparis	25	7	0	32
Auditor	3	5	0	8
Auditor Kepegawaian	0	1	0	1
Peneliti	6	1	0	7
Penerjemah	0	1	0	1
Perawat Gigi	0	1	0	1
Pranata Komputer	65	1	1	67
Pustakawan	15	3	0	18
Widyaiswara	0	1	0	1
Jumlah	114	22	1	137

Fit and Proper Test

Mahkamah Agung pada Tahun 2018 telah melaksanakan *fit and proper test* bagi calon pimpinan pengadilan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Yustisial, Panitera Pengganti, Asisten pada Mahkamah Agung dan tenaga teknis lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Data *Fit and Proper Test*

No.	<i>Fit and Proper Test</i>	Jumlah Peserta	Jumlah yang lulus	Keterangan
1	Calon Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas	2	1	Peradilan Umum
2	Calon Asisten Hakim Agung	25	14	Peradilan Umum
3	Calon Pimpinan PN klas IA Khusus dan IA	40	17	Peradilan Umum
4	Calon Pimpinan PN klas IB	116	45	Peradilan Umum
5	Calon Pimpinan PN Klas II (calon KPN)	125	69	Peradilan Umum
6	Calon Pimpinan PN Kls II (calon WKPN)	279	105	Peradilan Umum
7	Calon Pimpinan PT	15	10	Peradilan Umum
8	Panitera PT	2	0	Peradilan Umum
9	Panitera IA.K	22	12	Peradilan Umum
10	Panitera IA	42	18	Peradilan Umum
11	Panitera IB	10	8	Peradilan Umum
12	Calon Pimpinan kls II (WKPA/MS)	96	62	Peradilan Agama
13	Calon Pimpinan (WKPTA/MS Aceh)	22	14	Peradilan Agama
14	Calon Pimpinan(WKPA/MS kls I A)	42	29	Peradilan Agama
15	Calon Pimpinan WKPA kls II	59	54	Peradilan Agama

No.	<i>Fit and Proper Test</i>	Jumlah Peserta	Jumlah yang lulus	Keterangan
16	Calon Panitera PTA/MS Aceh	15	6	Peradilan Agama
17	Pimpinan Pengadilan Militer Tinggi	8	7	Peradilan Militer
18	Hakim Militer Tinggi	9	6	Peradilan Militer
19	Pimpinan Pengadilan Militer Tipe A	4	4	Peradilan Militer
20	Kadilmil Tipe B	11	10	Peradilan Militer
21	Wakadilmil Tipe B	5	4	Peradilan Militer
22	Calon Asisten Hakim Agung	6	3	Peradilan TUN
23	Calon Panitera Pengadilan TUN	24	10	Peradilan TUN
24	Calon Panitera Muda PTUN	33	10	Peradilan TUN

PELAKSANAAN KEBIJAKAN NASIONAL

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 147/SEK/VIII/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, penyelenggara negara terdiri atas hakim, panitera dan pejabat eselon I, II, III dan pejabat lainnya yang ditentukan undang-undang. Pejabat tersebut wajib melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang dimiliki pada posisi per tanggal 31 Desember dan LHKPN tersebut disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya. Sampai dengan Desember 2018 jumlah wajib lapor yang telah melaporkan LHKPN sebanyak 10.582. Penyelenggara negara di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai dengan waktu yang ditentukan tanpa alasan yang sah, promosi, mutasi, kenaikan pangkat, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja yang bersangkutan akan ditinjau kembali dengan penundaan atau pembatalan.

Tiga Program Prioritas Nasional

Mahkamah Agung melalui Badan Litbang Diklat Kumdil dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi nasional tersebut menjalankan 3 (tiga) program prioritas nasional peningkatan kompetensi SDM aparatur peradilan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 yang implementasinya sebagai berikut:

Kerja Sama Mahkamah Agung dengan Kementerian Hukum dan HAM

Tabel Kerja sama Diklat dengan Kementerian Hukum dan HAM

No.	Bentuk Kerja Sama	Peserta
1.	Diklat Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) 9 Angkatan @ 5 orang	55 orang hakim tingkat pertama dari lingkungan Peradilan Umum
2.	Diklat Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Palembang. 2 Angkatan @ 5 orang	10 orang hakim tingkat pertama dari lingkungan Peradilan Umum wilayah Palembang
3.	Diklat Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Surabaya	5 orang hakim tingkat pertama PN Surabaya

Pendidikan dan Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu

Pada tahun 2018 Badan Litbang Diklat Kumdil telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan SPPA terpadu baik yang dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan kementerian/instansi lain, jaksa, polisi, petugas balai pemasyarakatan (Bapas) dan pekerja sosial, sebagaimana tabel diatas.

Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Lingkungan Hidup

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa perkara lingkungan hidup harus diadili oleh hakim lingkungan hidup. Pada tahun 2018 Badan Litbang Diklat Kumdil telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan sertifikasi bagi hakim pada lingkungan peradilan umum dan hakim pada lingkungan peradilan tata usaha negara yang diikuti oleh hakim sebanyak 82 orang.

Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Niaga

Mahkamah Agung telah mengeluarkan pelbagai regulasi serta pendidikan dan pelatihan sertifikasi hakim niaga untuk mendukung kemudahan berusaha. Pada tahun 2018 Balitbang Diklat Kumdil telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan sertifikasi hakim niaga bagi hakim peradilan umum yang diikuti oleh sebanyak 37 orang hakim.



Manajemen Keuangan, Aset dan Teknologi Informasi

PROGRAM PEMBARUAN

Tata Kelola Keuangan Berbasis Teknologi Informasi

Mahkamah Agung selama tahun 2018 telah mengimplementasikan seluruh siklus keuangan negara melalui penggunaan sistem berbasis TI seperti Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Sistem Aplikasi Satker (SAS), Aplikasi Gaji Pegawai Pusat (GPP), Sistem *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja Terpadu (Smart), *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi (Sprint), Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak *Online* (Simponi), Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) serta e-Rekon dan Laporan Keuangan (LK).

Selain penggunaan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung juga mengembangkan aplikasi internal untuk menunjang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang dikelolanya, yaitu:

1. Aplikasi Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIMARI) untuk pengelolaan dan pelaporan data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
2. Aplikasi Komunikasi Data Nasional (Komdanas) dan dipergunakan oleh seluruh Satker di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yang meliputi:
 - a. Modul Tunjangan Khusus Kinerja (Tukin);
 - b. Modul Rekening dan Saldo Rekening;
 - c. Modul Saldo Awal SAKPA/SAIBA;
 - d. Modul *Backup* SAIBA;
 - e. Modul *Prepaid*-Persekot Gaji;
 - f. Modul Utang kepada Pihak Ketiga;
 - g. Modul Informasi Akrual;
 - h. Modul TP/TGR;
 - i. Modul Rumah Negara;
 - j. Modul Laporan Keuangan/CaLK;
 - k. Modul Sewa Rumah Dinas;
 - l. Modul Biaya Perkara.

Tata Kelola Aset Berbasis Teknologi Informasi

Mahkamah Agung sedang mengembangkan Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIPERMARI) yang dapat diakses dan dikelola secara mandiri oleh Mahkamah Agung. Sistem ini dibangun dengan memanfaatkan pangkalan data (*database*) aplikasi SIMAN. Kerja sama interkoneksi *database* Barang Milik Negara (BMN) ini telah dilakukan dan disepakati bersama antara Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan dengan tujuan untuk melakukan penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian BMN yang berada di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Dengan terbangunnya SIPERMARI, diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan informasi aset yang lengkap dan *valid* sekaligus mempermudah pengelolaan dan penatausahaan aset secara *real time* sehingga mendukung Mahkamah Agung dalam pengambilan kebijakan, pengawasan, dan pengendalian BMN.

Pembaruan Teknologi Informasi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Tata kelola TI merupakan kebutuhan di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik karena TI memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tata kelola

TI berfungsi untuk menyelaraskan kebutuhan, kondisi, dan pilihan para pemangku kepentingan untuk menentukan keseimbangan, tujuan organisasi yang akan dicapai, mengatur arah melalui prioritas dan membuat keputusan serta memonitor prestasi sesuai dengan arah dan tujuan organisasi. Selain itu, Tata Kelola TI dapat digunakan dalam memberikan arah, landasan, dan dasar hukum dalam penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi.

Pemutakhiran Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Modul Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah dan Modul Gugatan Sengketa Pemilu

Berkembangnya aktivitas ekonomi syariah berimplikasi pada munculnya pelbagai sengketa dalam bidang ekonomi syariah. Oleh karena itu, pada tahun 2018 Mahkamah Agung mengembangkan aplikasi SIPP Modul Gugatan Ekonomi Syariah. Di samping itu, dalam rangka mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2018, Mahkamah Agung juga telah membuat dan mengembangkan fitur aplikasi SIPP Modul Gugatan Sengketa Pemilihan Umum.

Aplikasi *e-Court* (*e-filing, e-payment, e-summons*)

Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Untuk melaksanakan administrasi perkara secara elektronik, Mahkamah Agung mengembangkan aplikasi *e-Court* yang secara resmi diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan.

Aplikasi *e-Court* merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara *online*, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara *online*, pembayaran secara *online* dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Aplikasi ini memungkinkan advokat mendaftarkan perkara, membayar perkara, mendapatkan nomor perkara hingga panggilan sidang secara elektronik. Setelah mendapat persetujuan tergugat untuk beracara secara elektronik, proses penyampaian nota jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan juga dapat dilakukan secara elektronik sehingga para pihak tidak perlu datang langsung ke pengadilan. Aplikasi *e-Court* adalah aplikasi terpusat yang berada di data center Mahkamah Agung dan terintegrasi dengan aplikasi SIPP di setiap pengadilan tingkat pertama.

MANAJEMEN KEUANGAN

Laporan Keuangan Berbasis Akrua

Implementasi laporan keuangan Mahkamah Agung berbasis akrual secara penuh telah dilaksanakan selama 4 (empat) tahun terakhir (sejak tahun 2015) dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 6 (enam) kali secara berturut-turut. Laporan keuangan berbasis akrual merupakan laporan yang memberikan informasi secara lebih komprehensif dan lebih baik dibandingkan laporan

keuangan berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*), dengan informasi dapat tersaji secara lebih transparan dan akuntabel, yaitu dapat memberikan informasi yang bermanfaat, baik bagi para pemangku kepentingan maupun pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan karena adanya pengungkapan secara paripurna atau *full disclosure*.

Upaya perbaikan kualitas laporan keuangan di Mahkamah Agung terus dilakukan melalui penerbitan pedoman akuntansi berbasis akrual dan pelaporan keuangan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 Tanggal 17 Oktober 2018 dan sudah disosialisasikan pada tanggal 19 – 20 Desember 2018 di gedung Mahkamah Agung yang dihadiri oleh perwakilan seluruh eselon I di lingkungan Mahkamah Agung. Pedoman akuntansi berbasis akrual dan pelaporan keuangan disusun untuk menyeragamkan perlakuan akuntansi atas pencatatan setiap transaksi yang dilakukan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Penganggaran Berbasis Kinerja **Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja**

Berdasarkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035 yang menekankan pada pentingnya penguatan sistem anggaran berbasis kinerja di lingkungan Mahkamah Agung, kebutuhan anggaran didasarkan pada kinerja pengadilan yang terukur agar anggaran yang dibutuhkan dapat dialokasikan secara proporsional untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung.

Penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, telah disusun usulan Standar Biaya Keluaran (SBK) penyelesaian perkara dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan PMK Nomor 86 Tahun 2017 diatur besaran satuan biaya penyelesaian per perkara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel SBK Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung

1	Perkara Pidana Umum	Rp1.460.765,00 per perkara
2	Perkara Pidana Khusus	Rp1.502.233,00 per perkara
3	Perkara Pidana Militer	Rp1.205.331,00 per perkara
4	perkara PHI < 150 jt	Rp1.100.253,00 per perkara

Tabel SBK Penyelesaian Perkara di Peradilan Umum

1	Perkara di Pengadilan Tk. Pertama
a.	Pidana Umum Rp538.000,00-- Rp695.000,00 per perkara
b.	Pidana Tipikor Rp885.000,00-- Rp1.036.000,00 per perkara
c.	PHI < 150 jt Rp1.376.000,00-- Rp1.665.000,00 per perkara
2	Perkara di Pengadilan Tk. Banding
a.	Pidana Umum Rp776.000,00-- Rp956.000,00 per perkara
b.	Pidana Tipikor Rp790.000,00-- Rp1.057.000,00 per perkara

- SBK pembebasan biaya perkara: Rp730.000,00 sampai dengan Rp910.000,00 per perkara.
- SBK sidang di luar gedung pengadilan: Rp775.000,00 sampai dengan Rp2.235.000,00 per perkara.

Tahun 2018 Mahkamah Agung mendapatkan Pagu alokasi anggaran sebesar Rp8.262.100.000.000,00 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-863/MK.02/2017 Tanggal 26 Oktober 2017 perihal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2018 dan mendapatkan tambahan anggaran sebanyak 2 (dua) kali pada tahun anggaran 2018, yaitu pada:

1. Program pendidikan dan pelatihan aparatur Mahkamah Agung untuk pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu tahun 2018 sebesar Rp29.226.773.000,00 sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-1667/AG/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal Penyampaian Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) dan BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Mahkamah Agung (BA 005).
2. Program:
 - a. Dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya Mahkamah Agung Rp172.453.122.000,00.
 - b. Penyelesaian perkara Mahkamah Agung Rp12.700.000.000,00.
 - c. Peningkatan manajemen Peradilan Agama Rp306.000.000,00.
 - d. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Mahkamah Agung Rp1.355.862.000,00.

Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-2528/AG/2018 Tanggal 8 November 2018 perihal Penyampaian SP SABA 999.08 Dalam Rangka Pergeseran Anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Mahkamah Agung (BA 005). Untuk tambahan anggaran belanja pegawai, Mahkamah Agung mendapat tambahan anggaran sebesar Rp186.815.109.000,00 sehingga total pagu alokasi anggaran Mahkamah Agung tahun anggaran 2018 sebesar Rp8.478.226.882.000,00. Untuk pengelolaan hibah, Mahkamah Agung per tanggal 30 September 2018 telah menerima hibah langsung dari dalam negeri sebesar Rp37.834.097.325,00 yang terdiri atas sebagai berikut:

1. Hibah langsung berupa uang:

Tabel Hibah langsung berupa uang

No.	Penerima Hibah	Pemberi Hibah	Nilai Hibah
1	PN Liwa	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Rp65.000.000,00
2	PA Krui	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Rp20.000.000,00
			Rp85.000.000,00

2. Hibah langsung berupa barang

Penerimaan hibah langsung berupa barang sejumlah Rp37.749.097.325,00 terdiri atas hibah tahun lalu senilai Rp20.718.177.484,00 dan hibah tahun berjalan senilai Rp17.030.919.841,00.

Kegiatan prioritas yang dicapai oleh Mahkamah Agung tahun anggaran 2018 dengan pagu alokasi anggaran yang diterima dapat memenuhi kegiatan sebagai berikut:

1. Terpenuhinya pengadaan alat pengolah data untuk mendukung pelaksanaan SIPP dari jumlah hakim pada 4 (empat) lingkungan peradilan sebanyak 50%;
2. Terpenuhinya pengadaan alat pengolah data untuk mendukung SPPT pada pengadilan tingkat banding;
3. Terpenuhinya sarana pendukung SIPP pada pengadilan tingkat banding yang ditunjuk sebagai *pilot project*;
4. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung *pilot project e-Court* sebanyak 32 pengadilan tingkat pertama.

Realisasi belanja Mahkamah Agung pada tahun 2018 adalah sebesar Rp8.423.420.612.355,00. atau mencapai **99,35%** dari total pagu keseluruhan sebesar Rp8.478.226.882.000,00. Berdasarkan data dari aplikasi *Online Monitoring Sistem* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 Mahkamah Agung menempati peringkat pertama dalam realisasi penyerapan anggaran tingkat K/L dari 86 K/L.

Target dan Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2018

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung berperan aktif dalam pengelolaan PNBP. Hal ini dibuktikan dengan menetapkan target penerimaan PNBP sebesar Rp67.004.428.174,00. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 realisasi PNBP Mahkamah Agung sebesar Rp54.681.817.787,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel PNBP Mahkamah Agung Tahun 2018

No	Kelompok PNBP	Target PNBP	Realisasi PNBP
1	PNBP Umum	23.929.025.927	14.370.662.734
2	PNBP Fungsional	43.075.402.247	40.311.155.053
Jumlah		67.004.428.174	54.681.817.787

Berdasarkan tabel di atas, realisasi PNPB tidak sesuai dengan target, karena adanya penghapusan akun pendapatan legalisasi tanda tangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan akun pelunasan pembayaran penerimaan kembali persekot/uang muka gaji sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 476A/SEK/KU.01/07/2017 dan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 190/Bua.3/KU.01/09/2017.

Penyelesaian Kerugian Negara pada Mahkamah Agung Tahun 2018

Berdasarkan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya sampai dengan 31 Desember 2018, kasus kerugian negara sejumlah 711 kasus dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp29.511.838.050,35. Dari jumlah tersebut, yang sudah melakukan pembayaran sebesar Rp27.487.828.523,84 atau 93,14% dan sisa angsuran sebesar Rp2.024.009.526,51 atau 6,86%.

Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan pada Mahkamah Agung Tahun 2018

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK semester II Tahun 2018, Mahkamah Agung telah menindaklanjuti rekomendasi dari BPK yang terdiri atas 489 temuan dengan 987 rekomendasi senilai Rp33.009.247.403,20 sebagai berikut:

- Ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 877 rekomendasi atau 88,86% senilai Rp27.267.606.249,02
- Ditindaklanjuti belum sesuai dan masih dalam proses tindak lanjut sebanyak 97 rekomendasi atau 9,83% senilai Rp5.218.412.334,55
- Belum ditindaklanjuti sebanyak 2 rekomendasi atau 0,20% senilai Rp0
- Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 11 rekomendasi atau 1,11% senilai Rp523.228.819,63



Berdasarkan data diatas secara keseluruhan yang telah ditindaklanjuti Mahkamah Agung RI sebanyak 974 rekomendasi atau 98,69%

MANAJEMEN ASET

Pengelolaan aset negara berupa barang milik negara (BMN) secara modern merupakan tantangan tersendiri bagi Mahkamah Agung sebagai pengguna barang dalam mendukung fungsi peradilan. Mahkamah Agung melakukan pengelolaan BMN dengan memanfaatkan TI sehingga dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan hasil yang lebih baik dan tingkat validitas data yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat tantangan ke depan dalam mendukung pengelolaan BMN yang baik adalah ketersediaan *database* BMN yang selalu termutakhirkan (*up to date*) dukungan teknologi informasi yang canggih, serta sumber daya pengelola aset yang kompeten.

Pengelolaan dan Penatausahaan Aset

Pengelolaan dan penatausahaan BMN oleh Mahkamah Agung dilaksanakan melalui pembinaan dan pengawasan terhadap 4 lingkungan badan peradilan yang terdiri atas 825 Satker pengadilan di seluruh wilayah Indonesia dan 7 Satker eselon I. Jumlah ini belum termasuk 85 Satker pengadilan baru yang tahun ini pengoperasiannya diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung, karena alokasi anggarannya masih berada di pengadilan induk masing-masing.

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya mencatatkan nilai BMN sebesar Rp27.388.738.539.853,00 dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKN/L) tahun 2018 (per 31 Desember 2018) yang terdiri dari barang persediaan, aset tetap, aset bergerak dan aset tak berwujud. Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp4.999.994.540.952,00 (22,33%) (tanggal cetak 11 Januari 2019 pukul 09.00 WIB). Nilai BMN ini terus meningkat sejak tahun 2016 karena Mahkamah Agung secara aktif melaksanakan program revaluasi BMN yang diprakarsai oleh Kementerian Keuangan.

Pada tanggal 1 November 2018, Mahkamah Agung kembali menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan dalam kategori kepatuhan pelaporan BMN terbaik dari 86 K/L. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Keuangan kepada Sekretaris Mahkamah Agung dalam acara Seminar Hari Oeang ke-72 di Jakarta. Pencapaian tersebut lebih baik daripada pencapaian sebelumnya pada tahun 2017 karena diikuti oleh seluruh kementerian/lembaga (86 K/L).

Upaya yang dilakukan Mahkamah Agung dalam mendapatkan kriteria kepatuhan pelaporan BMN terbaik sebagai berikut:

Penetapan Status Penggunaan BMN

Penetapan status penggunaan BMN menandai tahap penggunaan dan pemanfaatan BMN sebagai tahap awal dalam kegiatan/proses selanjutnya, baik terkait pengelolaan maupun penatausahaan BMN. Sampai dengan 31 Desember 2018, proses penetapan status penggunaan BMN yang dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Status Penggunaan BMN. Sampai dengan saat ini telah dikeluarkan sebanyak 3.364 SK dengan nilai sebesar Rp7.873.195.781.453,00.

Penetapan status penggunaan BMN pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2017. Hal ini disebabkan proses pembinaan dan *monitoring* pimpinan Mahkamah Agung dan pejabat eselon I berjalan secara efektif sehingga terdapat kesepahaman dan tanggung jawab bersama terhadap pentingnya pengelolaan dan penatausahaan aset.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengadilan Baru

Pada tanggal 22 Oktober 2018, Ketua Mahkamah Agung didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Gubernur Sulawesi Utara, dan Bupati Kepulauan Talaud meresmikan operasional 85 pengadilan baru di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Peresmian tersebut merupakan tindak lanjut atas terbitnya Keputusan Presiden Nomor 13 s.d 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Baru di Bawah Mahkamah Agung.

Walaupun sarana dan prasarana pendukung operasional pengadilan baru masih belum memadai, Mahkamah Agung bertekad untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan di seluruh pelosok Indonesia sebagai upaya mewujudkan kemudahan akses keadilan bagi semua orang.

Pinjam Pakai dan Hibah

Keterbatasan anggaran Mahkamah Agung, khususnya untuk pengadaan tanah dan bangunan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung terus berupaya untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait agar aset yang masih dalam status pinjam pakai dapat dihibahkan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) PMK Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dan PMK Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 data tanah yang masih dalam status pinjam pakai dan tercatat dalam SIMAK BMN Mahkamah Agung yaitu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bidang dengan luas 143.916 m².

Sertifikasi Tanah

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya terus melakukan upaya tertib administrasi dan tertib hukum dalam pengelolaan BMN, khususnya lahan yang belum berstatus milik Pemerintah Republik Indonesia cq Mahkamah Agung, baik yang berasal dari pengadaan sendiri, hibah dari status pinjam pakai maupun yang berasal dari nota kesepahaman antara Mahkamah Agung dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tabel Sertifikasi Tanah TA. 2018 di Setiap Lingkungan Peradilan

No.	Peradilan	Sudah Sertifikat	Belum Sertifikat	Jumlah
1	Umum	1.773 bidang luas 3.041.912 m ²	647 bidang luas 1.289.457 m ²	2.420 bidang luas 4.331.369 m ²
2	Agama	746 bidang luas 1.487.193 m ²	244 bidang luas 536.379 m ²	990 bidang luas 2.023.572 m ²
3	Militer	21 bidang luas 43.372 m ²	12 bidang luas 29.294 m ²	33 bidang luas 72.666 m ²
4	Tata Usaha Negara	72 bidang luas 131.315 m ²	25 bidang luas 75.195 m ²	97 bidang luas 206.510 m ²
Jumlah		2.612 bidang luas 4.703.792 m²	928 bidang luas 1.930.325 m²	3.540 bidang luas 6.634.117 m²

Percepatan Penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Mahkamah Agung terus melakukan penyelesaian konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dan sampai akhir tahun 2018 sudah mencapai 90%. Hal ini menunjukkan komitmen Mahkamah Agung dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap dan Nomor 8 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Prototipe Gedung Kantor Pengadilan

Mahkamah Agung selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan akses keadilan bagi masyarakat, salah satunya dengan melakukan perbaikan, perluasan, dan penataan ruang pelayanan masyarakat dan ruang kerja aparaturnya peradilan.

Berdasarkan data per 31 Desember 2018 jumlah gedung pengadilan yang sudah sesuai dengan prototipe sebanyak 509 pengadilan atau 61,7% dari total seluruh gedung kantor pengadilan di seluruh Indonesia (tidak termasuk pengadilan baru).

Tabel Perbandingan Gedung Pengadilan yang Telah dan Belum Prototipe

No.	Ruang Lingkup Peradilan	Prototipe		Belum Prototipe		Jumlah Satker	Gedung Prototipe 2018 (%)
		2017	2018	2017	2018		
1	Peradilan Umum	200	196	182	186	382	51,3 %
2	Peradilan Agama	285	280	103	108	388	72,1 %
3	Peradilan Militer	18	17	5	6	23	74 %
4	Peradilan Tata Usaha Negara	16	16	16	16	32	50 %
Jumlah		519 63%	509 62%	306 37%	316 38%	825	61,7 %

Berdasarkan tabel di atas, terdapat penurunan jumlah gedung pengadilan yang sudah sesuai dengan prototipe karena kriteria standar prototipenya berbeda dengan tahun sebelumnya. Kriteria prototipe gedung pengadilan saat ini tidak lagi hanya berdasarkan tampak depan saja, tetapi juga pada keseluruhan aspek konstruksi dan *layout* gedung. Mahkamah Agung sedang melakukan pembaruan standar prototipe berdasarkan adanya kebutuhan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada setiap pengadilan demi peningkatan pelayanan bagi para pencari keadilan.

Penghapusan BMN

Penghapusan BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dilaksanakan untuk mendukung upaya pengelolaan BMN secara tertib, terarah, adil, dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan BMN yang efisien, efektif, dan optimal.

Tabel Perbandingan pencapaian penghapusan BMN Tahun 2017 dan 2018

No.	Jenis Penghapusan Aset BMN	2017		2018		Persentase (%)
		SK	Nilai (Rp)	SK	Nilai (Rp)	
1	Bangunan Gedung	7	1.272.589.900,00	8	1.737.774.399,00	27
2	Rumah Negara	1	229.000.000,00	0	0	0
3	Peralatan Kantor	53	15.930.531.163,00	77	22.832.543.302,00	30
4	Kendaraan Dinas	46	1.818.069.002,00	45	2.949.278.609,00	38
5	Motor Boat	1	9.115.000,00	1	13.986.125,00	35
6	Barang Tidak Berwujud	1	4.650.000,00	1	9.500.000,00	51
Jumlah		109	19.263.955.065,00	132	27.543.082.435,00	30

Revaluasi BMN

Seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung sebagai unit akuntansi pengguna/kuasa pengguna barang, sudah melaksanakan revaluasi BMN dalam dua tahun anggaran, yaitu tahun 2017 dan tahun 2018 dengan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah satuan kerja sebanyak 798.
2. Jumlah NUP aset yang dilakukan penilaian kembali: 11.013.
3. Jumlah LHIP/BAR: 904.
4. Nilai wajar hasil penilaian kembali: Rp24.872.318.635.272,00.
5. Terdapat barang yang tidak ditemukan sebanyak 660 NUP sudah diberikan penjelasan dan tindak lanjut kepada Kementerian Keuangan.

Hasil pelaksanaan revaluasi tersebut sudah ditindaklanjuti dengan membuat laporan pelaksanaan revaluasi dan membuat nota kesepakatan dengan lampiran hasil verifikasi dan validasi revaluasi BMN.

Langkah Strategis Pengelolaan BMN

Beberapa langkah strategis yang akan dilakukan Mahkamah Agung dalam upaya pengelolaan BMN secara lebih tertib, akuntabel, dan transparan serta memanfaatkan TI sebagai berikut:

1. mengembangkan dan menggunakan aplikasi SIPERMARI untuk keperluan *monitoring* dan evaluasi pengelolaan dan penatausahaan BMN secara *realtime* sekaligus sebagai sistem informasi aset/BMN keseluruhan yang digunakan oleh Mahkamah Agung;
2. membuat prototipe gedung kantor pengadilan dan rumah dinas yang baru sesuai dengan kebutuhan setiap lingkungan peradilan;
3. membuat peta jalan pembangunan gedung kantor pengadilan;
4. menyusun pedoman standardisasi sarana dan prasarana pengadilan;
5. menyusun pedoman atau Standar Operasional Prosedur (SOP) internal pengelolaan dan penatausahaan BMN;
6. melakukan pembinaan dan sosialisasi tertib administrasi pengelolaan dan penatausahaan BMN yang mencakup penetapan status BMN;

7. melaksanakan komunikasi dan koordinasi secara lebih intensif dengan pemerintah daerah setempat dan Kementerian Keuangan terkait BMN berstatus pinjam pakai;
8. menyusun skala prioritas renovasi dan perbaikan rumah dinas dan sarana prasarana kantor gedung lainnya;
9. menyelesaikan temuan BPK terkait konstruksi dalam pengerjaan untuk dilanjutkan atau tidak sesuai dengan kemampuan anggaran;
10. melanjutkan proses sertifikasi tanah/lahan yang digunakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya;
11. meningkatkan kompetensi SDM pengelola aset;
12. merealisasikan pembangunan pengadilan terpadu di wilayah hukum Sulawesi Utara;
13. mengusulkan pencabutan moratorium pembangunan gedung pengadilan, khususnya untuk pengadilan yang baru dibentuk secara bertahap.

PENERAPAN MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI

Pengembangan Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Pengembangan sistem informasi merupakan salah satu strategi yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai peningkatan efektivitas dan efisiensi atas pemanfaatan sumber daya informasi peradilan dan peningkatan pelayanan peradilan. Pengembangan Teknologi informasi sebagai berikut:

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perkara

Untuk meningkatkan pemutakhiran fungsi sistem informasi manajemen perkara, pada tahun 2018, Mahkamah Agung telah melakukan pengembangan sistem TI di bidang manajemen perkara sebagai berikut:

1. e-Court (*e-filing, e-payment, e-summons*)
2. Integrasi Data antara e-Court dan SIPP
3. Pengembangan SIPP versi 3.2.0
4. Revitalisasi Direktori Putusan

Sistem Aplikasi PNBP Online

Pengembangan sistem aplikasi PNBP *online* bertujuan untuk menghasilkan sebuah sistem terpusat yang dapat mengumpulkan seluruh data penerimaan dan penyetoran PNBP pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Sasarannya adalah untuk menjadikan sistem aplikasi PNBP *online* sebagai alat kerja utama untuk Bendahara Penerima yang mudah, efisien, dan bermanfaat bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Manfaat sistem aplikasi PNBP online sebagai berikut:

- memudahkan bagi staf dan pejabat di lingkungan Biro Keuangan dalam memberikan informasi PNBP di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, baik kepada pimpinan maupun kepada masyarakat pada umumnya secara akurat, cepat dan mudah;
- memudahkan bagi staf dan pejabat di lingkungan Biro Keuangan dalam membina, mengontrol, dan memanfaatkan informasi PNBP secara cepat, tepat, dan mudah.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen perkara karena dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis pengadilan. Penerapan teknologi informasi dapat memberikan pelbagai keuntungan, yaitu kecepatan (*speed*), konsistensi (*consistency*), ketepatan (*precision*), dan keandalan (*reliability*). Pemanfaatan TI oleh Mahkamah Agung merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*”. Selain itu, pemanfaatan TI dapat mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas proses penanganan dan penyelesaian perkara di peradilan.



Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan

PROGRAM PEMBARUAN

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang Kumdil) memiliki dua fungsi strategis yang harus dikembangkan, yaitu *pertama* fungsi litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Mahkamah Agung dalam mengadili dan *kedua* fungsi litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung.

Penyusunan Konsep Renstra 2020--2024

Puslitbang Kumdil menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan konsep Rencana Strategis 2020-2024 Badan Litbang Diklat Kumdil. Tema besar terkait penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan peradilan adalah peningkatan kualitas penelitian dengan sasaran/target, yaitu analisis kebutuhan penelitian, peningkatan jumlah dan kualitas peneliti, pengembangan anotasi putusan, yurisprudensi, dan diseminasi hasil putusan.

Pelaksanaan Diseminasi Hasil Penelitian

Pelaksanaan diseminasi tersebut dilakukan di 6 (enam) kota dengan peserta yang terdiri atas Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim, Panitera di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, serta Advokat.

PENELITIAN DAN PENGKAJIAN

Tahun 2018, Puslitbang Kumdil menghasilkan 14 topik penelitian, sebagai berikut:

Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yang dilakukan oleh Puslitbang Kumdil selama tahun 2018 sebagai berikut:

1. Pengaruh Akreditasi Penjaminan Mutu serta Inovasi Pelayanan Publik dengan Tingkat Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan
2. Implementasi Mekanisme *Small Claim Court* dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama
3. Prinsip Iktikad Baik dalam Perlindungan Pemegang Merek Terkenal dalam Putusan Pengadilan
4. Sistem Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
5. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan
6. Pengembangan Kewenangan Pengadilan dalam Sistem Eksekusi dalam Rangka Peningkatan Kemudahan Berusaha
7. Dinamika Perkembangan Masyarakat Hukum Adat Waris bagi Masyarakat Adat Batak Karo

Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yang dilakukan oleh Puslitbang Kumdil selama tahun 2018 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Jabatan Kepaniteraan dalam Sistem Peradilan
2. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
3. Pola Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Peradilan Pajak
4. Peran Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam Mewujudkan Pengadilan Militer yang Modern
5. Eksistensi dan Perkembangan Doktrin Kekebalan Diplomatik dalam Praktik Peradilan di Indonesia
6. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
7. Jabatan Fungsional Pranata Peradilan di Mahkamah Agung

Kompilasi dan Republikasi

Pada tahun 2018 Puslitbang Kumdil menyusun 4 (empat) Buku Kompilasi dan Republikasi sebagai berikut:

1. Putusan-putusan Penting Pengadilan tentang Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia;
2. Putusan-putusan Penting Pengadilan tentang Gugatan Sederhana;
3. Putusan-putusan Penting Pengadilan tentang Putusan Pengadilan Militer;
4. Putusan-putusan Penting Pengadilan tentang Perkara Tata Usaha Negara;

Seminar

Berdasarkan laporan penelitian yang dihasilkan, beberapa topik penelitian kemudian diangkat dalam kegiatan seminar yang melibatkan para pimpinan Mahkamah Agung, hakim agung, hakim tingkat banding, dan hakim tingkat pertama serta para praktisi, akademisi, dan lembaga-lembaga terkait dengan substansi seminar. Tahun 2018 hasil penelitian yang diseminarkan sebagai berikut:

Kekayaan Intelektual

Seminar bertajuk “Kekayaan Intelektual” dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2018 dengan menghadirkan pembicara dari Indonesia dan Jepang. Seminar ini membicarakan mengenai bagaimana kekayaan intelektual dilindungi dalam hukum Indonesia dan hukum Jepang.

Penguatan Integritas dan Kompetensi Hakim Untuk Mewujudkan Visi Badan Peradilan Yang Agung

Seminar bertajuk “Penguatan Integritas dan Kompetensi Hakim untuk Mewujudkan Visi Badan Peradilan yang Agung” dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2018 dan menghasilkan kesimpulan bahwa untuk mewujudkan visi badan peradilan yang agung dibutuhkan penguatan integritas dan kompetensi hakim.

Kerja Sama Penelitian

Pada tahun 2018 Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung telah melakukan 4 (empat) kerja sama penelitian dengan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Kerja sama tersebut sebagai berikut:

1. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Litbang Diklat Kumdil dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian Hukum, dan Pengabdian Masyarakat pada tanggal 4 September 2018;
2. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tentang Penelitian dan Pengkajian Hukum, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan kegiatan akademik lainnya seperti seminar dan *workshop* pada tanggal 12 September 2018;
3. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya tentang Penelitian dan Pengkajian Hukum, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan kegiatan akademik lainnya seperti seminar dan *workshop* pada tanggal 18 September 2018;
4. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung dengan Fakultas Hukum Universitas Jember tentang Penelitian dan Pengkajian Hukum, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan kegiatan akademik lainnya seperti seminar dan *workshop* pada 24 September 2018.

Peran Serta Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung dalam Forum Ilmiah

Pada tahun 2018, Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung telah turut serta berkontribusi dalam pelbagai kegiatan di forum kajian ilmiah seperti konferensi, simposium, FGD dan lokakarya yang melibatkan lembaga dan institusi di luar Mahkamah Agung. Keturutsertaan tersebut sebagai berikut:

1. Konferensi Pembaruan Peradilan Indonesia (*Indonesian Judicial Reform Forum*) dilaksanakan pada tanggal 15 - 16 Januari 2018;
2. FGD tentang Pertimbangan Hukum Kejaksaan Agung mengenai Solusi Permasalahan Penyiaran *Multipleksing* dan Dampaknya Terhadap Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Melalui Sistem *Terrestrial* oleh Lembaga Penyiaran Swasta dilaksanakan pada tanggal 30 - 31 Januari 2018;
3. Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Penegakan Hukum Kontrak (Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN) dilaksanakan pada Februari sampai dengan Oktober 2018;
4. FGD tentang Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Kemudahan Berusaha, (Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN) dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2018;
5. Optimalisasi Penanganan Perkara yang diselenggarakan Komisi Yudisial, dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2018;
6. Rapat Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Perlindungan Terhadap Investor Minoritas, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), KemenkumHam dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2018;
7. Rapat Tim Penyusunan Naskah Akademik RUU, Pusat Perencanaan Hukum Nasional dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2018;
8. Kongres Nasional Lembaga Litbangyasa, Kemenristek Dikti dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 4 Mei 2018;
9. Rapat Penyusunan Posisi Indonesia dalam Perundingan IEU-CEPA, Direktur Kerja sama Penanaman Modal Luar Negeri dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2018;
10. FGD tentang Pemaparan Naskah Awal Analisis Kesenjangan Penanganan dan Pengelolaan Bukti Elektronik, Project Manager Kemitraan dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2018;
11. Penyusunan dan Pembahasan Kode Etik dan Perilaku Peneliti dan Finalisasi AD ART Himpenindo, Kemenristek Dikti dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2018;
12. FGD tentang Kerja sama Penelitian Indonesia dan Belanda, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristek Dikti dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2018;
13. Seminar tentang Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Nasional Perempuan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2018;
14. Rapat Penggunaan *Restatement* sebagai Bahan Ajar Penelitian Hukum dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2018;
15. Rapat Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Penegakan Hukum Kontrak, BPHN dilaksanakan pada tanggal 21 September 2018.

JURNAL HUKUM DAN PERADILAN

Jurnal Hukum dan Peradilan adalah jurnal ilmiah yang dikelola dan diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung. Sejak tahun 2016 Jurnal Hukum dan Peradilan telah menerapkan pengelolaan penerbitan jurnal dengan sistem elektronik atau dikenal dengan manajemen penerbitan jurnal elektronik dan telah memperoleh akreditasi majalah ilmiah dari Panitia Penilai Majalah Ilmiah (P2MI) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Akreditasi tersebut berdasarkan Sertifikat Akreditasi Nomor 792/Akred/P2MI-LIPI/11/2017.

Pengawasan

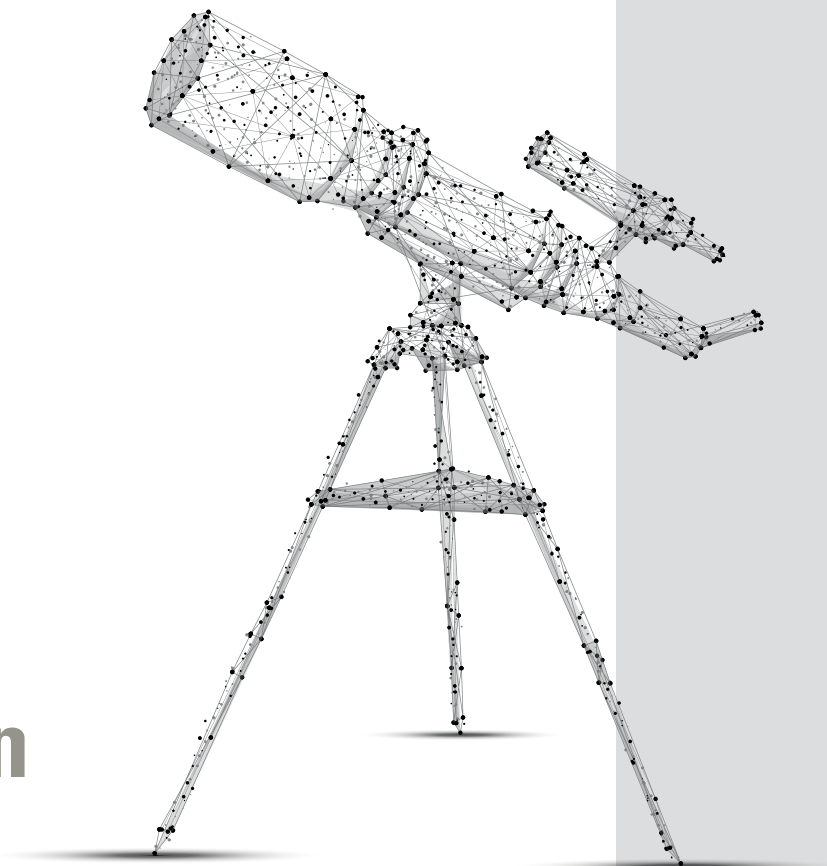
PROGRAM PEMBARUAN

Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) MARI Versi 3.0

Aplikasi SIWAS dikembangkan berdasarkan hasil evaluasi dari permasalahan yang timbul dan penyempurnaan proses bisnis versi sebelumnya (versi 2.0). Selain itu, diperlukan revisi prosedur operasi standar (POS) dan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya sehingga ada kesesuaian antara aplikasi SIWAS dengan POS SIWAS dan Petunjuk Pelaksanaan PERMA Nomor 9 Tahun 2016.

Pembangunan Aplikasi e-Monitoring Pengawasan

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan dan PERMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dalam Melaksanakan Pengawasan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan, Badan Pengawasan membangun aplikasi untuk memantau dan melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan yang disebut *e-Monitoring* pengawasan.



Sistem Informasi Penelusuran Penanganan Pengaduan (SIP3)

Setelah SIWAS diimplementasikan, Badan Pengawasan kemudian mengembangkan SIP3 yang digunakan untuk memantau dan memberikan laporan yang tepat dan akurat serta untuk mendukung percepatan proses penyelesaian penanganan pengaduan sehingga pimpinan dapat mengambil keputusan dengan cepat, mudah, efektif, dan efisien.

Aplikasi SIP3 digunakan untuk memantau data pengaduan yang berasal dari aplikasi SIWAS. Dalam aplikasi tersebut akan ditambahkan 2 fitur, yaitu fitur *chat* yang memungkinkan sesama pengguna untuk berkomunikasi dan fitur notifikasi suara untuk mengetahui adanya pengaduan masuk dan penelaah yang ditunjuk.

Persiapan Percontohan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SNI ISO 37001:2016) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Surabaya

Badan Pengawasan bekerja sama dengan USAID CEGAH mengadakan persiapan Percontohan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SNI ISO 37001: 2016) terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Surabaya. Dipilihnya kedua pengadilan tersebut sebagai pengadilan percontohan agar budaya jujur, bersih, transparan, dan patuh dapat diterapkan di seluruh pengadilan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016.

Beberapa hasil dari Fase I Percontohan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SNI ISO 37001: 2016) terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Surabaya adalah sebagai berikut:

- Pernyataan anti penyuapan
- Struktur Organisasi
- Panduan pelaksanaan penilaian risiko penyuapan
- Protokol respons terhadap dugaan dan insiden penyuapan serta eskalasi.

KEGIATAN BADAN PENGAWASAN

Penanganan Pengaduan

Pada tahun 2018 jumlah pengaduan yang masuk sebagai berikut:

Tabel Jumlah Pengaduan Tahun 2018

No	Jenis Pengaduan	Masuk
1	Pengaduan yang disampaikan Langsung ke Badan Pengawasan	2.119
2	Pengaduan dari Instansi (<i>stakeholder</i> Mahkamah Agung)	523
3	Pengaduan Aplikasi SIWAS	380
4	Pengaduan dari Satgas	58
Jumlah		3.080

Pada tahun 2018 tindak lanjut penanganan pengaduan yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Tahun 2018

No.	Jenis Tindak Lanjut	Jumlah Tindak Lanjut
1	Masih dalam proses	919
2	Selesai diproses	2.161
Pengaduan ditindaklanjuti		
a.	Diperiksa Tim Badan Pengawasan	207
b.	Delegasi ke Tingkat Banding	49
c.	Delegasi ke tingkat pertama	477
d.	Memorandum/delegasi internal	153
e.	Dijawab Surat (instansi)	263
Pengaduan tidak ditindaklanjuti		
a.	Dijawab surat	631
b.	Diarsipkan	381
Jumlah		3.080

Sidang Majelis Kehormatan Hakim

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial, melaksanakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terhadap 2 orang hakim, seperti pada tabel berikut:

Tabel Sidang Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2018

No.	Nama	Jabatan	Jenis Hukuman/Keterangan
1	JW L, S.H.	Hakim PN Yogyakarta	Pemberhentian tetap dengan hak pensiun.
2	EW	Hakim PN Kupang	Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 149/P yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatan hakim di Lingkungan Peradilan Umum, sehingga Sidang MKH tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus pelanggaran perilaku hakim.

Perbandingan penjatuhan hukuman disiplin yang dilaksanakan melalui Sidang MKH dari tahun 2016 s.d. 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Perbandingan Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Sidang Majelis Kehormatan Hakim dari Tahun 2016 s.d. 2018

No.	Jenis Hukuman	Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Diberhentikan tidak dengan hormat	0	0	0	0
2	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.	3	2	0	5
3	Pemberhentian dengan hak pensiun	0	0	1	1
4	Nonpalu selama 3 bulan	0	0	0	0
5	Nonpalu selama 6 bulan	0	0	0	0
6	Nonpalu selama 13 bulan	0	0	0	0
7	Teguran tertulis	0	0	0	0
Jumlah		3	2	1	6

Penjatuhan Hukuman Disiplin

Sebagai tindak lanjut surat pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan, pada tahun 2018 Badan Pengawasan telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 163 aparat peradilan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Hukuman Disiplin Tahun 2018

NO	Jabatan	Jenis Hukuman Disiplin			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1 *)	Hakim	24	27	50	101
	Hakim Ad Hoc	1	0	1	2
2	Panitera	2	1	3	6
3	Sekretaris	0	0	4	4
4	Panitera Muda	1	1	3	5
5	Panitera Pengganti	8	3	8	19
6	Juru Sita	1	0	3	4
7	Juru Sita Pengganti	1	1	3	5
8	Pejabat Struktural	1	0	6	7
9	Staf	4	2	4	10
Jumlah		43	35	85	163

*) Data tersebut termasuk rekomendasi dari Komisi Yudisial yang menyangkut pelanggaran nonteknis yudisial (sebanyak 11 orang hakim) yang ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.

Badan Pengawasan juga mengeluarkan surat keterangan bila ternyata dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan bukti pelanggaran seperti yang diadukan sehingga terlapor dipulihkan nama baik, kedudukan, harkat, dan martabatnya. Jumlah terlapor yang dipulihkan nama baik, kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti pada tabel berikut:

Tabel Data Pemulihan Nama Baik Tahun 2018

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Hakim	99
2.	Panitera	9
3.	Sekretaris	3
4.	Panitera Muda	9
5.	Panitera Pengganti	9
6.	Juru Sita	2
7.	Juru Sita Pengganti	3
8.	Pejabat Struktural	2
9.	Staf	0
10.	Calon Hakim	0
11.	Honorar	2
Jumlah		138

Penguatan Sistem Pengawasan

Penguatan pengawasan dilakukan melalui tiga bentuk kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang dan Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan
2. *Consulting* dalam Rangka Peningkatan Pengawasan
3. Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*)

Penyamaran (*Mystery Shopping*)

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/SK/III/2018 tentang Pedoman Uji Integritas Pelayanan Publik Pengadilan (PUIP3) yang merupakan hasil kerja pokok peningkatan kepercayaan publik. Tim kelompok kerja peningkatan pelayanan publik berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 135/KMA/SK/VIII/2016 yang melibatkan peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi yang memperkenalkan penggunaan metode *mystery shopping* di dalam melakukan pengawasan di lingkungan badan peradilan.

Kegiatan Pemeriksaan Reguler

Pemeriksaan Reguler

Badan Pengawasan dalam tahun 2018, telah melakukan pemeriksaan reguler pada 129 satuan kerja (Satker), sebagaimana tabel berikut:

Tabel Data Pengawasan Reguler Tahun 2018

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	24	24	15	8	71
Peradilan Agama	14	16	8	8	46
Peradilan Militer	1	2	1	1	5
Peradilan TUN	1	1	2	2	6
Pengadilan Pajak	0	1	0	0	1
Jumlah					129

Reguler Pendampingan

Pemeriksaan reguler pendampingan dilakukan untuk tujuan:

- a. pelaksanaan fungsi *assurance* (pengawasan fungsional), penguatan kapabilitas dan asistensi pelaksanaan pengawasan kepada hakim tinggi pengawas daerah; dan
- b. efektivitas penyampaian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan pada suatu wilayah.

Pada tahun 2018 Badan Pengawasan telah melaksanakan pemeriksaan reguler pendampingan pada beberapa satuan kerja sebagai berikut:

Tabel Data Pemeriksaan Reguler Pendampingan Tahun 2018

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	3	4	5	0	12
Peradilan Agama	4	4	2	0	10
Peradilan Militer	0	0	0	0	0
Peradilan TUN	1	0	0	0	1
Jumlah					23

Pemeriksaan Reguler Bersama KPK dan BPKP

Tujuan dilakukan pemeriksaan reguler bersama adalah sebagai berikut:

1. menjaga terselenggaranya manajemen peradilan dengan baik dan benar;
2. meningkatkan kinerja pelayanan publik;
3. menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan;
4. menjaga terwujudnya tertib administrasi persidangan.; dan
5. mencegah terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, dan pungutan liar.

Satuan Tugas Khusus Pengawasan

Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 54/BP/SK/IX/2016 Tanggal 2 September 2016 tentang Penetapan Satuan Tugas Khusus Pengawasan di Lingkungan Mahkamah Agung, sebagai dasar kegiatan melakukan pemantauan dalam penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung, meningkatkan kedisiplinan aparatur serta memaksimalkan pelayanan pengaduan.

Kegiatan Satgas Badan Pengawasan di meja pengaduan Mahkamah Agung telah menerima 58 pengaduan dengan rincian sebagai berikut:

1. pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah I sebanyak 8 pengaduan;
2. pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah II sebanyak 39 pengaduan;
3. pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah III sebanyak 9 pengaduan;
4. pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah IV sebanyak 2 pengaduan.

Pemeriksaan Kinerja dan Integritas

Badan Pengawasan sebagai pengawas internal pada tahun 2018 telah melakukan pemeriksaan kinerja dan integritas yang berorientasi pada pengelolaan keuangan negara, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 100 Satker sebagaimana tabel berikut:

Tabel Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2018

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	20	15	14	8	57
Peradilan Agama	7	9	9	5	30
Peradilan TUN	3	3	1	0	7
Peradilan Militer	2	3	1	0	6
Jumlah	32	30	25	13	100

Hasil temuan pemeriksaan kinerja bidang keuangan perkara yakni mencapai 162 temuan (47,50%). Dari hasil temuan ini dapat disimpulkan bahwa diperlukan kebijakan baru terkait dengan sistem penatausahaan persediaan yang dibiayai dari biaya proses.

Hasil temuan pemeriksaan kinerja bidang PNBPN yakni mencapai 65 temuan (42,76%) sehingga perlu dilakukan langkah-langkah guna mendorong terlaksananya penyetoran PNBPN sesuai dengan aturan yang berlaku (pengawasan intern).

Hasil temuan kualitas standar pelayanan mencapai 163 temuan (42,33%), sedangkan terkait kualitas sistem informasi pelayanan terdapat 72 temuan (18,70 %). Pada indikator sarana dan prasarana pelayanan publik terdapat 77 temuan (20%) dan terkait proses penanganan pengaduan terdapat 73 temuan (18,96%).

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Badan Pengawasan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap Satker eselon I pusat dan peradilan tingkat banding berjumlah 74 Satker dengan maksud untuk:

1. memberikan penilaian terhadap penerapan sakiip;
2. memberikan saran perbaikan terhadap penerapan sakiip;
3. memberikan saran perbaikan guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas unit/satuan kerja; dan
4. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Tabel Perbandingan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 dan 2017

No.	PERMENPAN RB No 12 Tahun 2015			
	Nilai	Kategori	Jumlah Satker	
			2016	2017
1	>90 – 100	AA	0	0
2	>80 – 90	A	1	3
3	>70 – 80	BB	41	49
4	>60 – 70	B	30	12
5	>50 – 60	CC	1	10
6	>30 – 50	C	1	0
7	0 – 30	D	0	0
Jumlah			74	74

Penilaian Zona Integritas

Pada tahun 2018 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan apresiasi dengan penganugerahan kepada 7 Satker sebagai zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi pada tanggal 10 Desember 2018 di Golden Ballroom Hotel Sultan Jakarta yang dihadiri oleh Wakil Presiden dan Instansi terkait lainnya. Ketujuh Satker dimaksud adalah:

1. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
2. Pengadilan Tinggi Jawa Barat;
3. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
4. Pengadilan Agama Surabaya;
5. Pengadilan Militer II-08 Jakarta;
6. Pengadilan Militer III-13 Madiun; dan
7. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang.

Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP)

Tim Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Badan Pengawasan telah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap 13 (tiga belas) pengadilan sebagai berikut:

1. PN Jakarta Selatan
2. PN Bandung
3. PN Jepara
4. PN Jayapura
5. PA Jayapura
6. PN Mataram
7. PN Ambon
8. PA Ambon
9. PN Merauke
10. PA Kendari
11. PA Wonogiri
12. PN Ternate
13. PN Balikpapan

Inspeksi Mendadak

Pelaksanaan inspeksi mendadak pada tahun 2018 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel Pelaksanaan Inspeksi Mendadak

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Mahkamah Agung	0	1	0	0	1
Peradilan Umum	3	4	4	2	13
Peradilan Agama	2	0	3	4	9
Peradilan TUN	1	3	4	3	11
Peradilan Militer	0	2	1	0	3
Jumlah	6	10	12	9	37

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

Tabel Kegiatan Badan Pengawasan selaku APIP

No	Kegiatan	Resume Hasil Pemeriksaan
1	Reviu Laporan Keuangan	Dilaksanakan reviu laporan keuangan sebanyak 3 (tiga) kali meliputi reviu: 1. Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2017 pada bulan Februari 2018; 2. Laporan Keuangan Semester Pertama Tahun Anggaran 2018 pada bulan Juli 2018; 3. Laporan Keuangan Triwulan III Komprehensif Tahun Anggaran 2018 pada bulan Nopember 2018. Catatan: Laporan Keuangan MA TA 2017 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
2	Reviu RKA K/L	Dilaksanakan pada Mahkamah Agung dan reviu RKA-KL di 3 (tiga) wilayah selama bulan September 2018, yaitu: 1. Reviu RKA K/L wilayah Sulawesi Utara; 2. Reviu RKA K/L wilayah Sumatera Barat; 3. Reviu RKA K/L wilayah Nusa Tenggara Timur.
3	Reviu RKBMN Online	Dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Oktober 2018 di Mahkamah Agung untuk TA 2020
4	Reviu Tender Pra DIPA dan Reviu PA PBJ	Berdasarkan hasil reviu dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi belanja telah mencapai lebih dari 80% dari rencana penyerapannya, yakni dengan perincian sebagai berikut: 1. Belanja pegawai mencapai 97,16% senilai Rp6.117,8 miliar 2. Belanja barang mencapai 95,37% senilai Rp1.225,8 miliar 3. Belanja modal mencapai 98,44% senilai Rp588,3 miliar 4. Berdasarkan skoring kualitas belanja yang dikembangkan BPKP, nilai kualitas belanja Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya mencapai 88,75%, yakni predikat kualitas belanja sangat baik. 5. Berbeda halnya dengan capaian kualitas belanja di tahun 2017 lalu, pelaksanaan tender pengadaan barang jasa pra-DIPA sampai dengan 25 Januari 2018 hanya sebanyak 13 (tigabelas) paket atau hanya sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah paket PBJ tahun 2018 dengan nilai Rp35.995.300.000,00 atau sekitar 8% (delapan persen) dari nilai PBJ tahun 2018.
5	Pemeriksaan Keuangan	Secara umum pengelolaan keuangan DIPA dan keuangan perkara telah dilakukan pengendalian intern secara efektif, tetapi masih ditemukan kesalahan administratif yang berdampak pada kerugian negara yang diselesaikan melalui mekanisme penyetoran ke kas negara atau proses tuntutan ganti rugi (TGR). Sementara itu, untuk kesalahan yang bersifat perbaikan pencatatan administrasi sudah ditindaklanjuti dengan perbaikan pada saat berlangsungnya pemeriksaan sehingga diharapkan permasalahan tersebut tidak terulang di tahun berikutnya.
6	Audit Pengadaan Barang/Jasa	1. Secara umum pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah telah memperhatikan ketentuan yang berlaku, tetapi masih terdapat penyelesaian pembangunan yang tidak tepat waktu dan terdapat kekurangan volume pekerjaan; 2. Pemanfaatan pengadaan berbasis elektronik melalui <i>e-purchasing</i> belum optimal.
7	Consulting dan Assurance	Pada tahun 2018 QA dilakukan sebanyak 4 kali.

No	Kegiatan	Resume Hasil Pemeriksaan
8	<i>Liaison Officer</i> (LO)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan atas laporan keuangan Mahkamah Agung tahun anggaran 2017 dengan hasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 6 (enam) kali berturut-turut. 2. Pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban PNPB, keuangan perkara, uang titipan pihak ketiga dan belanja tahun anggaran 2017 sampai dengan semester I tahun 2018 pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. 3. Pemeriksaan pendahuluan atas pelayanan peradilan dan pengelolaan sumber daya tahun anggaran 2017 sampai dengan semester I tahun anggaran 2018 pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. 4. Pemeriksaan terinci atas pelayanan peradilan dan pengelolaan sumber daya tahun anggaran 2017 sampai dengan semester I tahun anggaran 2018 pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. 5. Pemeriksaan atas penilaian kembali barang milik negara tahun 2017 di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. 6. Pemeriksaan interim atas laporan keuangan Mahkamah Agung tahun anggaran 2018 di wilayah Jawa Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur.

IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG (SIWAS)

Selama tahun 2018 aplikasi SIWAS telah menerima pengaduan sebagai berikut:

1. pengaduan dari pelapor secara mandiri : 265
2. pengaduan dari meja pengaduan 4 (empat) lingkungan peradilan: 107
3. pengaduan atas inisiatif sendiri dari pengadilan tingkat banding : 6
4. pengaduan dari delegasi pengadilan tingkat banding : 5

INTERNAL AUDIT CAPABILITY MODEL (IACM)

Berdasarkan hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung tahun 2017, dijumpai kelemahan dalam *key process area* (KPA) dan pemenuhan pernyataan untuk masing-masing elemen. Perkembangan pelaksanaan rencana tindak perbaikan peningkatan kapabilitas APIP pada Badan Pengawasan berdasarkan hasil sementara IACM Badan Pengawasan sudah level 3.

CAPAIAN KINERJA BADAN PENGAWASAN

Kegiatan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawasan digambarkan pada capaian kinerja Badan Pengawasan sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2018

Pemeriksaan / Kegiatan	Wilayah				Jumlah Realisasi	Target	Persentase
	I	II	III	IV			
Kasus	46	78	36	21	181	148 LHP	122%
Reguler	49	52	32	19	152	89 LHP	171%
Audit PBJ	3	2	3	3	11	8 LHP	137%
Reviu RKAKL dan Reviu RKBMN	1	2	1	1	5	4 LHP	125%
Reviu LK	0	6	0	0	6	2 LHP	300%
Pemeriksaan Kinerja / Integritas	31	31	26	12	100	78 LHP	128%
Pemeriksaan Keuangan	4	2	2	2	10	10 LHP	100%
Evaluasi LkjiP	1	1	1	1	4	4 kegiatan	100%
Audit Manajemen Kepegawaian	1	1	1	1	4	4 LHP	100%
Monitoring	3	6	3	3	15	12 LHP	125%
Jumlah	139	181	105	63	488	359	141%

Catatan : dari capaian, realisasi anggaran (99,81%)

Pagu : Rp33.944.916.000,00

Realisasi : Rp33.880.365.259,00 (99,81%)

Sisa : Rp64.550.741,00



Peran Serta Mahkamah Agung

FORUM NASIONAL

KERJA Sama Dalam Negeri

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung melakukan kerja sama dalam negeri sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung menjalin kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata pada tanggal 20 Februari 2018.
2. Mahkamah Agung Menjalinkan Kerja Sama tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dengan 7 bank pemerintah yaitu PT. Bank Mandiri, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BRI Syariah, PT. BNI (Persero) Tbk., dan PT. Bank BNI Syariah serta adendum Nota Kesepahaman dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 28 Agustus 2018
3. Mahkamah Agung menjalin kerja sama Penempatan dan Pengelolaan Disaster Recovery Center (DRC) dengan PT. Taspen (Persero) tanggal 13 Desember 2018 terkait penyediaan lokasi DRC bagi Mahkamah Agung pada DRC milik PT Taspen (Persero) yang bertempat di Denpasar.

Bantuan Sosial

Mahkamah Agung memiliki kepedulian sosial dalam penanganan bencana dengan membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Relawan dengan melibatkan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Ikatan Panitera dan Sekretaris Indonesia (IPASPI) dan Dharmmayukti Karini untuk membantu para korban bencana, baik dari kalangan warga peradilan maupun masyarakat secara umum. Kegiatan sosial tersebut terdiri dari:

1. Bantuan sosial bagi korban gempa bumi di Lombok dan Bali
2. Bantuan sosial bagi korban bencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi di Palu dan Donggala Sulawesi Tengah
3. Bantuan sosial bagi keluarga korban jatuhnya Pesawat Lion Air JT 610
4. Bantuan sosial bagi korban tsunami di Pandeglang Banten dan Lampung Selatan

FORUM INTERNASIONAL

Kerja Sama Internasional

Kontribusi Mahkamah Agung dalam bentuk kerja sama di kancah regional maupun internasional dilakukan dalam berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. **MoU Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Mahkamah Agung Kerajaan Belanda** pada tanggal 16 — 22 Januari 2018 di Jakarta. MoU ini merupakan tindak lanjut MoU sebelumnya. Materi MoU meliputi kerja sama teknis yudisial dan pertukaran informasi terkait dengan kegiatan pengembangan prosedur sistem kamar dan revitalisasi rapat pleno kamar, penguatan aspek organisasi dan operasional pendukung sistem kamar, pengembangan sistem *database* putusan penting / yurisprudensi, dan pengembangan praktek ketatanegaraan lainnya untuk mendukung konsistensi dan kesatuan hukum.
2. **Kerjasama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Majelis Al A'la Lil Qadha** tanggal 19 November 2018 di kantor gedung Utama *Majlis al A'la Lil Qadha* Manama, Bahrain. kedua lembaga negara sepakat untuk menjalin kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan hukum dan peradilan, di bidang peningkatan profesionalisme Hakim, di bidang pendidikan dan pelatihan melalui program studi banding, di bidang riset/penelitian di bidang hukum dan peradilan, di bidang pertukaran kunjungan *event* keilmuan, lokakarya, pertukaran keahlian dalam pengembangan hukum berbasis syariah di kedua negara, dan bidang lain sesuai dengan kepentingan bersama yang disepakati antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan *Majlis al A'la lil Qadha* (Mahkamah Agung) Kerajaan Bahrain.

Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dan Kunjungan Balasan ke Indonesia

Selama tahun 2018 Mahkamah Agung melakukan perjalanan dinas ke luar negeri sebagai berikut:

1. Kunjungan Ketua Mahkamah Agung untuk menghadiri undangan Supreme Court of Singapore dan Federal Court of Malaysia dalam rangka upacara *opening of the legal year* pada tanggal 8 Januari dan 12 Januari 2018
2. Kunjungan dalam rangka pelatihan kegiatan KCCP (Knowledge Co Creation Program) Country Focus Training on ToT for Elementary IP Course, kerja sama dengan JICA (*Japan International Cooperation Agency*) yang dilaksanakan di Tokyo, Jepang pada tanggal 12-24 Februari 2018.
3. Kunjungan Ketua Mahkamah Agung dalam rangka studi banding ke SCJ Panama untuk bertukar pengalaman terkait penanganan berbagai isu antara lain, isu hukum kemaritiman dan pengembangan hukum dalam keberagaman pada tanggal 6 Maret 2018.
4. Kunjungan Mahkamah Agung ke Bangkok dalam rangka *Judicial Integrity Champions in APEC* pada tanggal 8 Maret 2018 di Bangkok.
5. Kunjungan Mahkamah Agung ke Brazilia dalam rangka *World Water Forum* pada tanggal 21 Maret 2018 di Brazilia.
6. Kunjungan Mahkamah Agung ke Hoge Raad van der Nederlanden (MA Kerajaan Belanda) dalam rangka implementasi *Memorandum of Understanding* fase kedua antara MA RI dan MA Kerajaan Belanda pada tanggal 2-6 Juli 2018.
7. Kunjungan Mahkamah Agung ke Singapura dalam rangka *Council of ASEAN Chief Justices (CACJ) Meeting* yang keenam pada tanggal 25-28 Juli 2018.
8. Kunjungan Mahkamah Agung ke Singapura dalam rangka *General Assembly ASEAN Law Association* ke-13 pada tanggal 26 Juli 2018 di Raffles City Convention Center, Singapura.
9. Kunjungan Mahkamah Agung ke London Inggris dalam rangka Kongres *International Assessment Center Methods* di London Inggris pada tanggal 8-10 Oktober 2018.
10. Kunjungan Mahkamah Agung ke Brussel-Belgia dalam rangka Studi Banding di bidang HAKI pada tanggal 11-12 Oktober 2018.
11. Kunjungan Mahkamah Agung ke Thailand dalam rangka mempelajari beberapa parameter *Ease of Doing Business (EoDB)* pada tanggal 18-19 Oktober 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
12. Kunjungan Mahkamah Agung dalam rangka *Asia Pasific Judicial Conference on Environment and Climate Change Adjudication* di Nay Pyi Taw Myanmar pada tanggal 29 – 30 Oktober 2018. Dalam konferensi tersebut delegasi MA RI berbicara tentang peran pengadilan dalam mengadili perkara-perkara lingkungan hidup yang terkait dengan masalah perubahan iklim.

13. Kunjungan Mahkamah Agung dalam rangka studi banding tentang Manajemen Data Terintegrasi Sistem Peradilan Pidana ke Washington DC, Amerika Serikat pada tanggal 5-10 November 2018 untuk memahami manajemen data terintegrasi dalam sistem peradilan pidana.
14. Kunjungan Mahkamah Agung dalam rangka APEC *Workshop for Developing a Collaborative Framework for Online Dispute Resolution* bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri di Osaka Jepang pada tanggal 8 – 9 November 2018. Topik yang dibahas adalah tentang sistem mediasi yang terintegrasi dengan proses pengadilan di Indonesia dan kemungkinan penerapannya dalam sengketa dagang antarpelaku usaha menengah dan kecil di Kawasan Asia Pasifik.
15. Kunjungan Mahkamah Agung ke Singapura dalam rangka studi banding pelaksanaan administrasi perkara elektronik ke Singapura pada tanggal 13-15 November 2018 untuk mempersiapkan pelaksanaan sistem persidangan secara elektronik, dan meningkatkan pelaksanaan administrasi perkara elektronik.
16. Kunjungan Mahkamah Agung dalam rangka kerja sama *Council for ASEAN Chief Justice Supreme Court Thailand* melalui Judicial Training Institute, pada tanggal 19-30 November 2018 di Bangkok Thailand.
17. Kunjungan Mahkamah Agung ke Chongqing dalam rangka menghadiri *Legal Training Course on Regional Anti-Terrorism cooperation in Southeast and South Asia* di Chongqing China pada 20 November – 18 Desember 2018.
18. Kunjungan Mahkamah Agung ke Bangkok menghadiri undangan dari *International Commission of Jurists (ICJ)* dan *United Nation (UN) Women* dalam acara Dialog Yudisial Regional Asia Tenggara 2018, yang dilaksanakan pada tanggal 1-2 Desember 2018, di The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand.
19. Kunjungan *Hoge Raad* Kerajaan Belanda ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 3-7 Desember 2018. Delegasi *Hoge Raad* dipimpin oleh President Hoge Raad Maarten Feteris yang beranggotakan beberapa pejabat *Hoge Raad*.
20. Kunjungan Mahkamah Agung ke Malaysia dalam rangka *High Level Dialogue CACJ-AICHR Rights of Accused Persons in Criminal Case* pada tanggal 10-11 Desember 2018 di Hotel Le Meridien, Putrajaya, Malaysia.
21. Kunjungan Mahkamah Agung dalam rangka Konferensi Perubahan Iklim (UNFCCC) bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Katowice Polandia pada tanggal 10 – 12 Desember 2018. Topik yang dibahas adalah tentang peran pengadilan dalam mengadili perkara-perkara lingkungan hidup terkait dengan perubahan iklim terutama akibat kebakaran hutan dan lahan, sekaligus menjelaskan doktrin hukum baru "*in dubio pro natura*" yang dihasilkan dari putusan-putusan kasasi.

**Ringkasan Eksekutif
Laporan Tahunan 2018**

Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi



Mahkamah Agung Republik Indonesia.



Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13.
Jakarta Pusat - DKI Jakarta Indonesia 10110



(021) 3843348, 3810350, 3457661



info@mahkamahagung.go.id